



UKjIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2024

SASARAN STRATEGIS

Peningkatan produktivitas pertanian

Capaian sasaran diukur melalui indikator Produktivitas Pertanian, yang didukung oleh kinerja sebanyak 5 (lima) Program, yakni: Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Program Perizinan Usaha Pertanian, Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, dan Program Penyuluhan Pertanian.

Peningkatan produksi peternakan

Capaian sasaran diukur melalui indikator Produksi Peternakan, yang didukung oleh kinerja sebanyak 2 (dua) Program, yakni: Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, dan Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Meningkatnya Konsumsi pangan yang beragam

Capaian sasaran diukur melalui indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi, yang didukung oleh kinerja sebanyak 3 (tiga) Program, yakni: Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Program Penanganan Kerawanan Pangan, dan Program Pengawasan Keamanan Pangan.



distan.babelprov.go.id

DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024. LKj Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Penyusunan LKj Tahun 2024 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024.

Tujuan penyusunan laporan kinerja ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKj ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Pangkalpinang, 15 Januari 2025

**KEPALA DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN**



EDIROMDHONI, S.P., M.M.

NIP. 19701116 199303 1 005



IKHTISAR EKSEKUTIF

Capaian kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024 dalam mewujudkan sasaran strategis yang ingin dicapai dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Peningkatan produktivitas pertanian.

- Capaian sasaran diukur melalui indikator produktivitas pertanian dengan target pertumbuhan sebesar **6.94 ton/ha** yang dihitung berdasarkan total luas produksi komoditi pertanian dibagi luas tanam.
- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja sebanyak 5 (lima) Program, yakni: Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Program Perizinan Usaha Pertanian, Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, dan Program Penyuluhan Pertanian.
- Berdasarkan angka sementara Statistik Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024, produktivitas pertanian yang diukur dari angka pertumbuhan komoditi perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura mencapai angka **7.02 ton/ha**, dengan demikian capaian ini telah mencapai target yang ditentukan dengan persentase capaian terhadap target sebesar . Persentase pencapaian terhadap target mencapai **101.15%**. Dengan demikian capaian ini sesuai dengan target.
- Dibandingkan capaian target produktivitas pertanian tahun 2023 sebesar **6.70 ton/ha**, terjadi penurunan sebesar **4.78%**.

2. Peningkatan populasi peternakan.

- Capaian sasaran diukur melalui indikator produksi peternakan

dengan target sebanyak **29.303,89 Ton** yang dihitung melalui Jumlah Produksi ternak yang dihasilkan pada suatu wilayah dalam periode waktu tertentu. Kurun waktu yang digunakan untuk perhitungan pencapaian target indikator kinerja ini adalah 1 (satu) tahun.

- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja sebanyak 2 (dua) Program, yakni: Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, dan Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- Berdasarkan angka sementara Statistik Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024, Produksi peternakan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai angka **29.923,40 Ton** atau sebesar **102.11%** dari target yang ditentukan. Dengan demikian capaian ini telah melebihi target.
- Dibandingkan capaian produksi peternakan tahun 2023 sebanyak **28.054,03 Ton**, terjadi peningkatan sebesar **6.66%**.

3. Meningkatnya konsumsi pangan yang beragam.

- Capaian sasaran diukur melalui indikator skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi dengan target pencapaian angka **89.09**. Skor PPH konsumsi merupakan nilai yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama untuk memberikan gambaran tentang keanekaragaman konsumsi pangan dimasyarakat dengan perhitungan (n-1).
- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja sebanyak 3 (Tiga) Program, yakni: Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Program Penanganan Kerawanan Pangan, dan Program Pengawasan Keamanan Pangan.
- Berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, skor PPH konsumsi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024 mencapai angka **90.3** atau persentase realisasi sebesar **101.36%**

terhadap pencapaian target. Dengan demikian capaian ini telah melebihi target yang ditentukan.

- Dibandingkan capaian target skor PPH Konsumsi tahun 2023 sebesar **87,9**, terjadi peningkatan sebesar **3.21%**.

4. Meningkatnya tata kelola internal perangkat daerah (DPKP).

- Capaian sasaran diukur melalui indikator nilai Reformasi Birokrasi (RB) perangkat daerah dengan target angka penilaian dalam RENSTRA sebesar **81,29**. Nilai RB merupakan angka yang diperoleh berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai Reformasi Birokrasi (RB) terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.
- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja sebanyak 1 (satu) Program, yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.
- Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 19 Tahun Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, dinyatakan bahwa Penilaian RB tidak lagi dilakukan di Tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sehingga Perhitungan Capaian Target Indikator tidak dapat dilakukan.
- Nilai RB Perangkat Daerah tahun 2024 tidak diketahui karena adanya perubahan peraturan dari pusat, sehingga tidak lagi dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Reformasi Birokrasi (RB) terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, hal ini disesuaikan melalui Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tentang Perubahan Atas Keputusan

Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.4/020/Kpts/Dpkp-I Tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026, bahwa indikator kinerja utama (IKU) sasaran ini dihapus.

- Persentase ketercapaian terhadap target tahun 2024 terhadap capaian indikator Nilai RB Perangkat Daerah tahun 2023 **tidak dapat diperbandingkan**.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas, terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian khusus oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menentukan langkah antisipasi sebagai tindak lanjut pengendalian dari risiko yang timbul dalam proses pelaksanaan kegiatan. Adapun tantangan yang teridentifikasi dalam pencapaian target kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, sebagai berikut:

1. Penurunan luas lahan pertanian akibat alih fungsi lahan pertanian produktif ke penggunaan lahan non pertanian;
2. Semakin menurunnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) dan minat generasi muda untuk mengembangkan usaha di bidang pertanian;
3. Terbatasnya kemampuan akses petani terhadap teknologi, informasi, pasar dan permodalan serta perlindungan usahatani
4. Banyaknya petani yang beralih profesi menjadi penambang sebagai alternatif untuk meningkatkan pendapatan;
5. Dampak perubahan iklim global dan perubahan pola intensitas curah hujan yang menyebabkan cuaca ekstrim;
6. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi makanan sehat, bergizi, dan beragam;
7. Kenaikan harga pangan yang disertai penurunan daya beli masyarakat.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	viii
Daftar Gambar	x
BAB I. Pendahuluan	1
1.1. Cascading Kinerja, Peta Proses Bisnis, dan Struktur Organisasi	1
1.2. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan	4
1.3. Isu-isu Strategis	18
1.4. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran	18
BAB II. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	24
2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD	24
2.2. Strategi dan Arah Kebijakan	25
2.3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2024	26
2.4. Indikator Kinerja Utama (IKU)	28
2.5. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	29
2.6. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	35
BAB III. Akuntabilitas Kinerja	36
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2024	36
3.2. Efisiensi Anggaran	72
3.3. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024	74
3.4. Inovasi	75
3.5. Penghargaan	79
3.6. Crosscutting	81
BAB IV. Penutup	82
LAMPIRAN	86

DAFTAR TABEL

Tabel I.1.	Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi	19
Tabel I.2.	Sarana-Prasarana	22
Tabel I.3.	Perbandingan Anggaran Tahun 2023-2024.....	23
Tabel II.1.	Sasaran Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tahun 2023-2026.....	25
Tabel II.2.	Strategi dan Arah Kebijakan	25
Tabel II.3.	Struktur Program dan Kegiatan Terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2024.....	26
Tabel II.4.	Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2024	29
Tabel II.5.	Komponen Anggaran Induk pada Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024.....	29
Tabel II.6.	Perjanjian Kinerja Perubahan Ke-I Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024.....	31
Tabel II.7.	Komponen Anggaran Induk pada Perjanjian Kinerja Perubahan Ke-I Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024.....	31
Tabel II.8.	Perjanjian Kinerja Perubahan Ke-II Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024.....	33
Tabel II.9.	Komponen Anggaran Induk pada Perjanjian Kinerja Perubahan Ke-II Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024.....	33
Tabel III.1.	Skala Nilai Perangkat Kinerja	36

Tabel III.2.	Capaian Kinerja Tahun 2024	37
Tabel III.3.	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan (Sasaran 1).....	39
Tabel III.4.	Target dan Realisasi Kinerja (Sasaran 1).....	40
Tabel III.5.	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja PD dengan Nasional Tahun 2024 (Sasaran I)	46
Tabel III.6.	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan (Sasaran 2).....	53
Tabel III.7.	Target dan Realisasi Kinerja (Sasaran 2).....	53
Tabel III.8.	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja PD dengan Nasional Tahun 2024 (Sasaran 2)	56
Tabel III.9.	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan (Sasaran 3).....	60
Tabel III.10.	Target dan Realisasi Kinerja (Sasaran 3)	61
Tabel III.11.	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja PD dengan Nasional Tahun 2024 (Sasaran 3)	64
Tabel III.12.	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan (Sasaran 4)	68
Tabel III.13.	Target dan Realisasi Kinerja (Sasaran 4)	69
Tabel III.14.	Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2024	73
Tabel III.15.	Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1.	Cascading Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi ...	2
Gambar I.2.	Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	17
Gambar II.1.	Website Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	35
Gambar III.1.	Dokumentasi Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian (Sasaran I)	47
Gambar III.2.	Dokumentasi Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian)	49
Gambar III.3.	Dokumentasi Program Perizinan Usaha Pertanian).....	50
Gambar III.4.	Dokumentasi Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian)	51
Gambar III.5.	Dokumentasi Program Penyuluhan Pertanian.....	52
Gambar III.6.	Dokumentasi Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian (Sasaran 2)	57
Gambar III.7.	Dokumentasi Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	58
Gambar III.8.	Dokumentasi Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	65
Gambar III.9.	Dokumentasi Program Penanganan Kerawanan Pangan	66
Gambar III.10.	Dokumentasi Program Pengawasan Keamanan Pangan	67
Gambar III.11.	Bagan <i>Crosscutting</i> Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	81



BAB I

Pendahuluan

BAB I Berisi :

1. *Cascading Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi*
2. *Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan*
3. *Isu-Isu Strategis*
4. *Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran*

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Gubernur 54 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

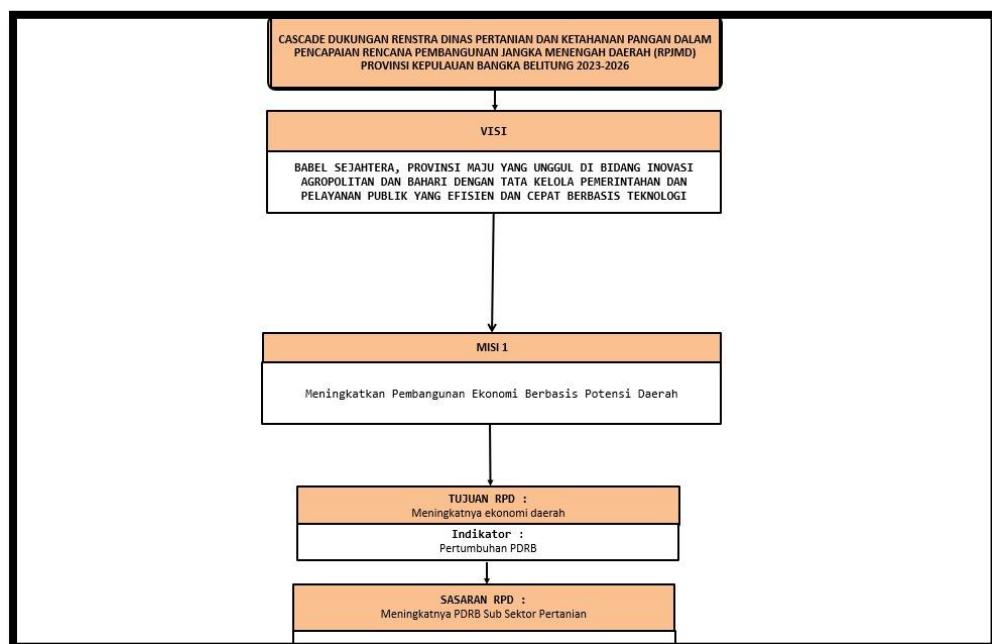
1.1. *Cascading* Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi

Setiap Perangkat Daerah (PD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan berupa dokumen Rencana strategis (Renstra). Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang

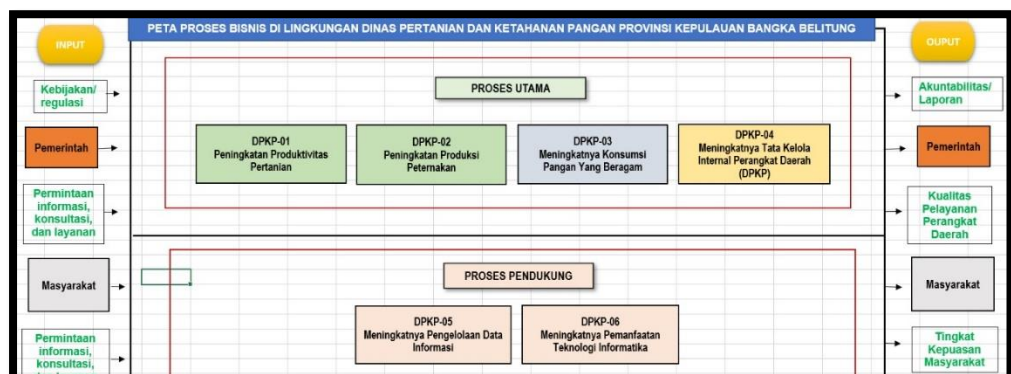
disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman dan sesuai dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026.

Hubungan antara cascading kinerja, peta proses bisnis dan desain struktur organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tersaji dalam gambar berikut:

Gambar I.1
Cascading Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi

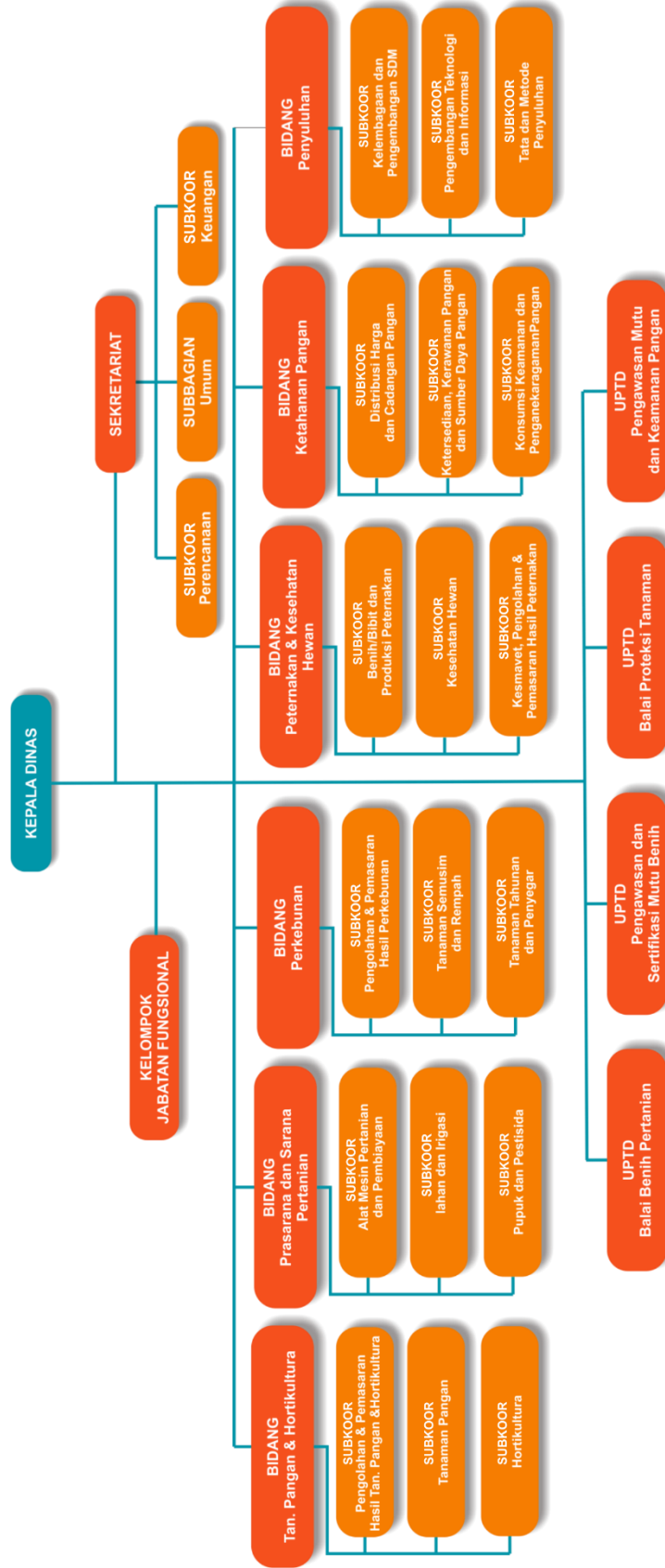


Ket: Cascading Lengkap dapat dilihat melalui Link : bit.ly/CascadeDPKP



Ket: Peta Proses Bisnis Lengkap dapat dilihat melalui Link : bit.ly/ProbisDPKP

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024



1.2. Tugas dan Fungsi, dan Peta Jabatan

Dalam upaya mewujudkan kinerja sebagaimana telah dimandatkan dalam RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki tugas dan fungsi yang kemudian menjadi dasar penempatan personil dalam jabatan. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No. 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian dan bidang Pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang Pertanian dan bidang Pangan yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. Penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang Pertanian dan bidang Pangan yang menjadi kewenangan Provinsi;
- c. Penyelenggaraan administrasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- d. Penyelenggaraan pemantauan evaluasi dan pelaporan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan; dan
- e. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Secara umum uraian tugas dan fungsi dalam susunan struktur organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kepulauan Bangka Belitung dijabarkan sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan bidang pangan yang menjadi kewenangan Provinsi, serta

melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian dan bidang pangan;
- b. Penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pertanian dan bidang pangan;
- c. Penyelenggaraan administrasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- d. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan bidang pertanian dan bidang pangan;
- e. Penyelenggaraan dan pengoordinasian UPTD;
- f. Penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai ASN;
- g. Penyelenggaraan pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- h. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, membina, mengevaluasi, mengendalikan dan menyelenggarakan administrasi badan meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian, keuangan serta membantu Kepala Dinas mengoordinasikan bidang-bidang. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan program kerja dinas;
- b. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rumusan bahan kebijakan teknis di bidang pertanian dan bidang pangan yang dilaksanakan oleh bidang-bidang;
- c. Penyelenggaraan dan pemberian dukungan administrasi yang

- meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan;
- d. Penyelenggaraan dan pengoordinasian perencanaan;
 - e. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dinas;
 - f. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pelayanan administrasi kepegawaian meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai dinas;
 - g. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/asset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan dinas;
 - h. Penyelenggaraan verifikasi hasil pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan badan serta UPTD;
 - i. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup dinas;
 - j. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pengumpulan dan pengolahan bahan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LAKIP, LKPJ dan LPPD lingkup dinas;
 - k. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pengolahan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup dinas;
 - l. Penyelenggaraan verifikasi hasil pengkajian bahan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pertanian dan bidang pangan;
 - m. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pengolahan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD dan/atau Cabang Dinas;

- n. Penyelenggaraan verifikasi kajian dan pertimbangan;
- o. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- p. Penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai ASN; dan
- q. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

3. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinasikan, memimpin, mengawasi, membina, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan program kerja dan kegiatan di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- b. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan rumusan kebijakan teknis Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- c. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan teknis perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura;
- d. Penyelenggaraan dan pengoordinasian perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih tanaman pangan dan hortikultura;
- e. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pengawasan peredaran dan sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura;
- f. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pemberian bimbingan teknis penerapan peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura;
- g. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim tanaman pangan dan hortikultura;
- h. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pemberian bimbingan teknis pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman

- pangan dan hortikultura;
- i. Penyelenggaraan verifikasi konsep surat rekomendasi teknis izin usaha di bidang tanaman pangan dan hortikultura lintas daerah Kabupaten/Kota;
 - j. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi pelaporan;
 - k. Penyelenggaraan pembinaan dan promosi ASN;
 - l. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

4. Bidang Perkebunan

Bidang Perkebunan mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di Bidang Perkebunan, Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan program kerja dan kegiatan di Bidang Perkebunan;
- b. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan rumusan kebijakan teknis perkebunan;
- c. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
- d. Penyelenggaraan dan pengoordinasian perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih;
- e. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pengawasan peredaran dan sertifikasi benih;
- f. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi;
- g. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam dan dampak perubahan iklim perkebunan;
- h. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penanggulangan gangguan usaha dan pencegahan kebakaran perkebunan;

- i. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
- j. Penyelenggaraan verifikasi konsep surat rekomendasi teknis izin usaha perkebunan lintas daerah Kabupaten/Kota;
- k. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- l. Penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai ASN; dan
- m. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

5. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan program kerja dan kegiatan di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- b. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan rumusan kebijakan teknis Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- c. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan kebijakan benih/bibit, produksi, peternakan dan kesehatan hewan, perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil perternakan;
- d. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pengelolaan sumber daya genetik hewan;
- e. Penyelenggaraan dan pengoordinasian perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/ bibit hijauan pakan ternak
- f. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
- g. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pengendalian penyakit

- hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- h. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pengawasan peredaran dan penggunaan serta sertifikasi benih/bibit ternak, pakan, hijauan pakan ternak, dan obat hewan;
 - i. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
 - j. Penyelenggaraan dan pengoordinasian sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
 - k. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pemberian rekomendasi teknis peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - l. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
 - m. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
 - n. Penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai ASN; dan
 - o. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

6. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian

Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan program kerja dan kegiatan di Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian;
- b. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan rumusan kebijakan teknis prasarana dan sarana pertanian;
- c. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;

- d. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
- e. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyediaan dan pengawasan peredaran pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;
- f. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pemberian bimbingan pembiayaan pertanian;
- g. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pemberian fasilitasi investasi pertanian;
- h. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- i. Penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai ASN;
- j. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

7. Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Pertanian

Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Pertanian mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang Penyuluhan dan Pengembangan Pertanian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan program kerja dan kegiatan di Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Pertanian;
- b. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan rumusan kebijakan Penyuluhan dan Pengembangan Pertanian;
- c. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pengembangan kelembagaan dan pengembangan sumber daya manusia penyuluhan;
- d. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pengembangan tata dan metode penyuluhan;
- e. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pengembangan teknologi

- dan Informasi Pertanian;
- f. Pengoordinasian Penyuluhan dan Pengembangan Pertanian;
 - g. Penyelenggaraan verifikasi konsep hasil kajian penyuluhan dan Pengembangan Pertanian;
 - h. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
 - i. Penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai ASN; dan
 - j. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

8. Bidang Ketahanan Pangan

Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan, pengembangan, pemantapan dan pemantauan ketersediaan pangan serta pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan, pemantauan, pemantapan distribusi pangan, mengevaluasi dan mengendalikan konsumsi dan keamanan pangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan program kerja dan kegiatan di Bidang Ketahanan Pangan;
- b. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan Ketahanan Pangan;
- c. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- d. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyiapan bahan pemantapan program dan pengawasan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;

- e. Penyelenggaraan dan pengoordinasian bimbingan teknis dan pengawasan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- f. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan rumusan kebijakan daerah di bidang distribusi, harga, dan cadangan pangan;
- g. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan rumusan kebijakan harga minimum pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- h. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan program, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang distribusi, harga, dan cadangan pangan;
- i. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pemantapan program di bidang distribusi, harga, dan cadangan pangan;
- j. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
- k. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pengelolaan cadangan pangan pemerintah Provinsi dan menjaga keseimbangan cadangan pangan pemerintah Provinsi;
- l. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pasokan dan harga pangan serta pengembangan jaringan distribusi;
- m. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pelaksanaan bimbingan teknis dan pengawasan di bidang distribusi, harga, dan cadangan pangan;
- n. Penyelenggaraan dan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang konsumsi pangan, pangan lokal, promosi panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan, kelembagaan keamanan pangan, pengawasan

- keamanan pangan, pengawasan mutu hasil pertanian (lintas Kabupaten/Kota), kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- o. Penyelenggaraan dan pelaksanaan bimbingan teknis dan pengawasan di bidang konsumsi pangan, pangan lokal, promosi penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan, kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan (lintas Kabupaten/Kota), kerja sama dan informasi keamanan pangan;
 - p. Penyelenggaraan dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan, pangan lokal, promosi penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan, kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan (lintas Kabupaten/Kota), kerja sama dan informasi keamanan pangan;
 - q. Penyelenggaraan dan pelaksanaan pembinaan komunikasi, informasi dan edukasi penganekaragaman konsumsi pangan;
 - r. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
 - s. Penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai ASN; dan
 - t. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

9. UPTD Balai Benih Pertanian

Balai Benih Pertanian melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di bidang perbanyak benih tanaman, menyebarluaskan dan pengembangan teknologi benih dan bibit bermutu varietas unggul benih dasar (BD) dan benih pokok (BP) sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta menyelenggarakan administrasi umum di lingkungan UPTD. Dalam melaksanakan tugas, Balai Benih Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana teknis operasional dibidang benih dan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan;
- b. Koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional dibidang benih dan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan;
- c. Evaluasi dan pelaporan di bidang benih dan produksi pertanian;
- d. Pengelolaan ketatausahaan dan;
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

10. UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Benih

Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Benih mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan, peredaran mutu benih dan sertifikasi mutu benih pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas, Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Benih dan Bibit menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana teknis operasional dibidang pengawasan dan sertifikasi benih pertanian;
- b. Koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional dibidang pengawasan dan sertifikasi benih pertanian;
- c. Evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan dan sertifikasi benih pertanian;
- d. Pengelolaan ketatausahaan dan;
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

11. UPTD Balai Proteksi Tanaman

Balai Proteksi Tanaman melaksanakan tugas operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang perlindungan tanaman

meliputi peramalan terhadap serangan hama dan penyakit tanaman/organisme pengganggu tanaman dan antisipasi dampak fenomena iklim, mengeluarkan rekomendasi pengendalian hama dan penyakit tanaman/organisme pengganggu tanaman serta pengawasan pestisida sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas, Balai Proteksi Tanaman menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana teknis operasional dibidang perlindungan tanaman pertanian;
- b. Koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional dibidang perlindungan tanaman pertanian;
- c. Evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan tanaman pertanian;
- d. Pengelolaan ketatausahaan dan;
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

12. UPTD Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan

UPTD Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan melaksanakan tugas operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan mutu dan keamanan pangan meliputi pelayanan teknis, pengujian, sertifikasi, serta registrasi produk pangan segar hasil pertanian sesuai dengan persyaratan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan hasil pertanian. UPTD Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan mempunyai fungsi:

- a. Pengawasan mutu dan keamanan produk pangan segar hasil pertanian;
- b. Pelayanan sertifikasi dan registrasi produk pangan segar hasil pertanian;
- c. Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan sertifikasi dan registrasi produk pangan segar hasil pertanian sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;

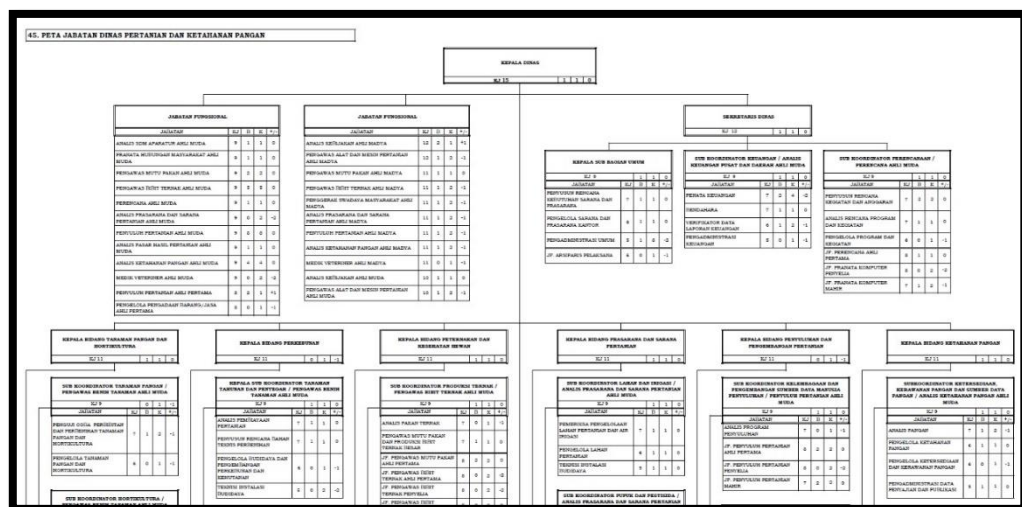
- d. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pelayanan sertifikasi dan registrasi produk pangan segar hasil pertanian yang beredar;
- e. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

13. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas, Kelompok Jabatan fungsional menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana teknis operasional sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing;
- b. Koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing;
- c. Evaluasi dan pelaporan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing;
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Gambar I.2.
Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Ket: Peta Jabatan Lengkap dapat dilihat melalui Link : bit.ly/PetaJabatanDPKP

1.3. Isu-isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menangkap dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu-isu strategis yang melingkupi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai bagian dari Perangkat Daerah yang memiliki tujuan “Pembangunan pertanian dan ketahanan pangan”, antara lain sebagai berikut:

1. PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) sub sektor pertanian;
2. Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian;
3. Peningkatan mutu, daya saing produk dan nilai ekspor hasil pertanian;
4. Peningkatan kapasitas sumberdaya pertanian yang unggul dan handal;
5. Peningkatan pola konsumsi dan ketahanan pangan masyarakat.

1.4. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, diperlukan ketersediaan sumberdaya pembangunan yang memadai. Pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana, serta sumberdaya penunjang/pendukung lainnya diperlukan untuk memenuhi kebutuhan minimal. Kondisi ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai perangkat dinas, dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel I.1.Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

NO	JABATAN	FORMASI/PETA JABATAN					PEGAWAI YANG ADA					JENIS KELAMIN	
		JUMLAH	KUALIFIKASI				JUMLAH	KUALIFIKASI				LAKI- LAKI	PEREMP UAN
			S2	S1	D3	SMA/SMP		S2	S1	D3	SMA/SMP		
-	TOTAL PEGAWAI NEGERI SIPIL	206	32	139	16	20	190	32	124	16	18	116	74
-	TOTAL PHL / PTK	139	1	55	13	70	133	1	49	13	70	76	57
A	JABATAN STRUKUTRAL	45	12	33	0	0	43	15	28	0	0	30	13
1	Pejabat ESELON II	1	1				1	1				1	
2	Pejabat ESELON III	11	11				11	6	5			9	2
3	Pejabat ESELON IV / Sub Koordinator / JF Penyetaraan	33		33			31	8	23			20	11
B	JABATAN FUNGSIONAL	97	17	67	10	3	88	14	61	12	3	51	37
1	Analisis Kebijakan	3	2	1			3	2	1			1	2
2	Analisis Kepegawaian	1		1			1		1			1	
3	Perencana	2	1	1			2	1	1			2	
4	Pranata Humas	2		2			1		1			1	
5	Pranata Komputer	2		1	1		2		1	1		2	
6	Penyuluh Pertanian	23	3	16	1	3	19	1	16	1	3	10	9
7	Pengawas Mutu Hasil Pertanian	14	2	11	1		13	2	10	1		7	6
8	Analisis Pasar Hasil Pertanian	2		2			2		2			1	1
9	Pengawas Benih Tanaman	8	2	4	2		8	2	4	2		5	3
10	Pengawas Bibit Ternak	14	1	11	2		12	1	11	2		8	4
11	Medik Veteriner	3	1	2			3	1	2			2	1
12	Parameter Medik	3			3		3			3		1	2
13	Pengawas Mutu Pakan	9	2	7			9	2	7			5	4

14	Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman	4		4			4		4			3	1
15	Analisis Ketahanan Pangan	7	3	4			6	2	4			2	4
C	JABATAN PELAKSANA	64	3	38	6	17	59	3	35	6	15	35	24
1	Analisis Alat dan Mesin Pertanian	1		1			1		1			1	
2	Analisis Data dan Informasi	4		4			4		4			1	3
3	Analisis Pangan	6		6			6		6			1	5
4	Analisis Pelaporan dan Transaksi Keuangan	1		1			1		1			1	
5	Analisis Pembiayaan Pertanian	1		1			1		1			1	
6	Analisis Pengelolaan Komoditas Perkebunan	3	1	2			3	1	2			1	2
7	Analisis Pengolah Hasil Pertanian	1		1			1		1				1
8	Analisis Program dan Pembangunan	1	1				1	1					1
9	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	1		1			1		1			1	
10	Analisis Tata Usaha	2		2			2		2			2	
11	Analisis Data dan Informasi	2		2			2		2				2
12	Bendahara	1		1			1		1				1
13	Pemeriksa Pengelolaan Lahan Pertanian dan Air Irigasi	1		1			1		1			1	
14	Penata Laporan Keuangan	6		6			4		4			1	3
15	Pengadministrasi Umum	15				15	13				13	12	1
16	Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Muda	1		1			1		1			1	
17	Pengawas Lalulintas Hewan dan Wilayah Karantina	1		1			1		1				1
18	Pengawas Penyakit dan Pengendali Penyakit Hewan	1		1			1		1				1
19	Pengawas Pupuk dan Peptisida	1		1			1		1			1	
20	Pengelola Alat dan Mesin Pertanian	1			1		1			1		1	
21	Pengelola Ketahanan Pangan	1			1		1			1			1

22	Pengelola Lahan Pertanian	1			1		1			1		1	
23	Pengelola Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman	1		1			1		1			1	
24	Pengelola Surat	1			1		1			1		1	
25	Pengelola Teknologi Perbenihan	1			1		1			1		1	
26	Pengujicoba Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura	1	1				1	1				1	
27	Pengujicoba Perbibitan dan Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura	1		1			1		1				1
28	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	1		1			1		1			1	
29	Pranata Pengembangan Bibit Tanaman Hutan dan Perkebunan	1			1		1			1			1
30	Teknisi Instalasi Budidaya	2				2	2				2	2	
31	Verifikator Keuangan	2		2			1		1			1	
D	PHL / PTK	139	1	55	13	70	133	1	49	13	70	76	57

Sumber : Subbag Umum, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2024

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 173 orang (53,56%), disusul oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 33 orang (10,22%), D3 sebanyak 29 orang (8,98%), SLTA sebanyak 78 orang (24,15%), dan SLTP sebanyak 10 orang (3,10%). Komposisi pegawai laki-laki sedikit lebih banyak dibanding pegawai perempuan, bahkan untuk jabatan struktural pun lebih banyak dijabat laki-laki. Hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Tabel I.2.
Sarana-Prasarana

No.	Nama Bidang Barang	Jumlah
1	TANAH	1.053.355 M²
2	PERALATAN DAN MESIN	2.674 Unit
	a. Alat-alat Besar	23 Unit
	b. Alat-alat Angkutan	71 Unit
	c. Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	104 Unit
	d. Alat-alat Pertanian/Peternakan	135 Unit
	e. Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	1.692 Unit
	f. Alat-alat Studio dan Komunikasi	166 Unit
	g. Alat-alat Kedokteran	69 Unit
	h. Alat-alat Laboratorium	411 Unit
	i. Alat-alat Keamanan	3 Unit
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	58 Unit
	a. Bangunan Gedung	55 Unit
	b. Bangunan Monumen	3 Unit
4	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	25 Unit
	a. Jalan dan Jembatan	7 Unit
	b. Bangunan Air/Irigasi	6 Unit
	c. Instalasi	8 Unit
	d. Jaringan	4 Unit
5	ASET TETAP LAINNYA	11.483 Buah
	a. Buku Perpustakaan	234 Buah
	b. Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	- Buah
	c. Hewan Ternak dan Tumbuhan	11.249 Buah
6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	1 Unit

Sumber : Subbag Umum, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2024

Kendaraan operasional Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari yakni 1 unit kendaraan dinas jabatan Eselon II, 10 unit kendaraan operasional jabatan Eselon III, dan 24 unit kendaraan roda dua. Kebutuhan ruangan kantor umum relatif sudah tersedia meliputi ruang rapat, ruang pengelola keuangan, ruang arsip, ruang mushola, ruang baca, ruang gudang, ruang tunggu, ruang laktasi, dan toilet. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik. Rasio personal komputer/laptop dibanding jumlah pegawai mendekati 50%. Dengan demikian ketersediaan sarana dan prasarana sudah memadai. Hanya saja sebanyak 70% dari komputer/laptop yang ada diproduksi dibawah tahun 2000an awal yang spesifikasinya sudah jauh tertinggal dengan kondisi saat ini sehingga tidak mendukung tuntutan pekerjaan yang 90% berbasis IT.

Tabel I.3
Perbandingan Anggaran Tahun 2023 dan 2024

Tahun	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah
2023	Rp69.199.632.472	Rp3.900.727.388	-	-	Rp73.100.359.860
2024	Rp55.147.366.409	-	-	-	Rp55.147.366.409

Sumber : Tim Perencanaan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2024

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Terlihat pada tabel I.3, untuk tahun 2024 dibanding tahun 2023 terdapat penurunan Total anggaran belanja sebesar Rp17.952.993.451,- Hal ini menunjukkan ada kendala anggaran untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BAB II

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

BAB II Berisi :

1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD
2. Strategi dan Arah Kebijakan
3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2024
4. Indikator Kinerja Utama (IKU)
5. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
6. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja PD

Renstra (Rencana Strategis) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan penjabaran operasional RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 telah mengakomodasi dinamika kegiatan selama kurun waktu 2023–2026.

Renstra ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 19 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026.

2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

Sesuai *cascade* kinerja, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah meningkatnya produksi sub sektor pertanian, peternakan, dan jasa pertanian. Terkait hal tersebut, tujuan jangka menengah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama lima tahun adalah:

1. Meningkatnya Produksi Pertanian;
2. Terwujudnya ketahanan pangan masyarakat melalui ketersediaan, distribusi, keterjangkauan, konsumsi pangan dan gizi serta keamanan pangan berbasis bahan baku, sumber daya dan kearifan lokal;
3. Mewujudkan reformasi birokrasi perangkat daerah (DPKP).

Adapun sasaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam waktu lima tahun sebagai berikut:

Tabel II.1
Sasaran Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tahun 2023-2026

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Baseline 2022	TARGET TAHUNAN				Target Akhir Renstra	Ket
					2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Peningkatan produktivitas pertanian	Produktivitas Pertanian	Ton/ha	6.79	6.61	6.94	7.29	7.65	7.65	-
2.	Peningkatan produksi peternakan	Produksi Peternakan	Ton	24,970.07	25,294.27	26,565.81	27,901.28	29,303.89	29,303.89	-
3.	Meningkatnya Konsumsi pangan yang beragam	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor	81.10	86.48	87.77	89.09	90.43	90.43	-
4.	Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah (DPKP)	Nilai RB Perangkat Daerah (DPKP)	Skor	87.49	80.88	81.29	81.69	82.10	82.10	Berdasarkan PERMENPANRB Terbaru, dinyatakan bahwa Penilaian RB tidak lagi dilakukan di Tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sehingga Perhitungan Capaian Target Indikator tidak lagi dilakukan.

Sumber : Renstra Perubahan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2023-2026

2.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel II.2
Strategi dan Arah Kebijakan

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Peningkatan produktivitas pertanian	Meningkatkan penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Meningkatkan luas tanam subsektor pertanian
	Meningkatkan penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Meningkatkan ketersediaan prasarana pertanian
	Mengendalikan dan menanggulangi bencana pertanian	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian
	Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyuluhan pertanian	Meningkatkan metode, teknologi informasi dan kelembagaan penyuluhan pertanian

Peningkatan produksi peternakan	Menyediakan dan mengembangkan sarana pertanian	Meningkatkan pertambahan angka produksi ternak
	Mengendalikan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Menurunkan kasus penyakit hewan menular
Meningkatnya Konsumsi pangan yang beragam	Mengelola sumberdaya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Meningkatkan ketersediaan pangan utama (beras)
	Melakukan penanganan kerawanan pangan	Mengurangi daerah rentan rawan pangan
	Meningkatkan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Meningkatkan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
	Meningkatkan pengawasan keamanan pangan	Meningkatkan konsumsi pangan B2SA
Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah (DPKP)	Meningkatkan kualitas kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	Meningkatkan nilai sakip PD (DPKP)

Sumber : Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2023-2026

2.3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2024

Struktur Program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024 maupun program dan kegiatan sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.3
Struktur Program dan Kegiatan Terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2024

Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1. Peningkatan produktivitas pertanian	Produktivitas Pertanian	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Rp10,427,414,412	Rp8,315,768,912	(2,111,645,500)
		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Rp542,000,000	Rp514,821,700	(27,178,300)
		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Rp9,853,594,212	Rp7,773,263,412	(2,080,330,800)
		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Rp31,820,200	Rp27,683,800	(4,136,400)
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Rp3,609,360,000	Rp1,934,960,800	(1,674,399,200)
		Penataan Prasarana Pertanian	Rp3,609,360,000	Rp1,934,960,800	(1,674,399,200)
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Rp560,968,954	Rp391,168,954	(169,800,000)
		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Rp560,968,954	Rp391,168,954	(169,800,000)

		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Rp521,973,700	Rp521,973,700	0
		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp521,973,700	Rp521,973,700	0
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Rp3,618,991,600	Rp2,296,980,800	(1,322,010,800)
		Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Rp132,089,800	Rp-	(132,089,800)
		Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Rp3,486,901,800	Rp2,296,980,800	(1,189,921,000)
2. Peningkatan produksi peternakan	Produksi Peternakan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Rp2,563,936,280	Rp1,854,453,810	(709,482,470)
		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Rp1,963,936,280	Rp1,254,453,810	(709,482,470)
		Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Rp600,000,000	Rp600,000,000	0
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Rp1,086,905,600	Rp708,946,700	(377,958,900)
		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rp356,728,000	Rp240,332,400	(116,395,600)
		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Rp253,376,100	Rp194,280,400	(59,095,700)
		Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Rp476,801,500	Rp274,333,900	(202,467,600)
3. Meningkatkan Konsumsi pangan yang beragam	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Rp159,407,300	Rp-	(159,407,300)
		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	Rp159,407,300	Rp-	(159,407,300)
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Rp894,877,308	Rp240,469,604	(654,407,704)
		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Rp89,946,300	Rp-	(89,946,300)
		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Rp407,990,300	Rp-	(407,990,300)
		Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	Rp396,940,708	Rp240,469,604	(156,471,104)
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Rp191,714,900	Rp167,711,300	(24,003,600)
		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	Rp191,714,900	Rp167,711,300	(24,003,600)
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Rp182,294,500	Rp126,491,600	(55,802,900)
		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rp182,294,500	Rp126,491,600	(55,802,900)

4. Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah (DPKP)	Nilai RB Perangkat Daerah (DPKP)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp35,805,928,255	Rp38,588,440,229	2,782,511,974
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp174,338,100	Rp70,904,500	(103,433,600)
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp27,824,977,200	Rp31,399,740,024	3,574,762,824
		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Rp34,096,000	Rp34,096,000	0
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp151,000,000	Rp84,000,000	(67,000,000)
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp833,494,445	Rp671,444,095	(162,050,350)
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp236,252,100	Rp21,013,700	(215,238,400)
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp5,470,096,810	Rp5,349,665,810	(120,431,000)
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp1,081,673,600	Rp957,576,100	(124,097,500)
TOTAL ANGGARAN YANG BERKAITAN LANGSUNG DENGAN PENCAPAIAN INDIKATOR SARARAN			Rp59,623,772,809	Rp55,147,366,409	

Sumber : Tim Perencanaan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2024

2.4. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RENSTRA Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II/PD/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah Indikator keluaran (Output) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis. Dokumen Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibuat dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/137/Kpts/DPKP-I/2023 (sebagaimana terlampir).

Sedangkan Indikator Kinerja Individu (IKI) adalah tingkat pencapaian atau hasil kerja seseorang dari sasaran tujuan yang harus dicapai organisasi dalam kurun waktu tertentu. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Individu sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada

sasaran strategis dalam RPD dan RENSTRA Perangkat Daerah.

2.5. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikatorkinerjanya.

2.5.1. Perjanjian Kinerja 2024 Induk

Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024 yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bapak Pj. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung sebagai berikut:

Tabel II.4
Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Target Triwulan	Target TW
1.	Peningkatan produktivitas pertanian	Produktivitas pertanian (Ton/Ha)	Ton/Ha	6,94	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	- - - 6,94
2.	Peningkatan produksi peternakan	Produksi Peternakan (Ton)	Ton	26.565,81	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	6.641,45 13.282,91 19.924,36 26.565,81
3.	Meningkatnya Konsumsi pangan yang beragam	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Nilai	8,77	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	- - - 87,77

Sumber : Tim Perencanaan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2024

Tabel II.5
Komponen Anggaran Induk pada Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024

NO	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Produktivitas pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp 10.427.414.412,-	APBD

		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp 3.609.360.000,-	APBD
		Program Penyuluhan Pertanian	Rp 3.618.991.600,-	APBD
		Program Perizinan Usaha Pertanian	Rp 521.973.700,-	APBD
		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp 560.968.954,-	APBD
2.	Produksi Peternakan	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp 1.086.905.600,-	APBD
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp 2.563.936.280,-	APBD
3.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Rp 159.407.300,-	APBD
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp 191.714.900,-	APBD
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp 894.877.308,-	APBD
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp 182.294.500,-	APBD
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Program yang tidak termasuk dalam Indikator)	Rp 35.805.928.255,-	APBD

Sumber : Tim Perencanaan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2024

2.5.2. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 (Perubahan Ke-I)

Pada tahun 2024, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024 melaksanakan reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Reviu dilakukan karena dengan dikeluarkannya Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023, melalui Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi RI Nomor : B274/AA.05/2023 tanggal 27 November 2023 yaitu “Menggunakan informasi capaian kinerja pada laporan kinerja sebagai dasar penentuan Target tahun selanjutnya, penyesuaian aktivitas strategi untuk mencapai kinerja, dan kebutuhan anggarannya”, sehingga perlu melakukan penyesuaian pada kolom Target Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan Berita Acara Perubahan Perjanjian Kinerja (Kesatu) Tahun 2024 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: BA-001/DPKP/PK/2024 Perjanjian Kinerja Perubahan adalah sebagai berikut:

Tabel II.6
Perjanjian Kinerja Perubahan Ke-I Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Target Triwulan	Target TW
1.	Peningkatan produktivitas pertanian	Produktivitas pertanian (Ton/Ha)	Ton/Ha	6,94	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	- - - 6,94
2.	Peningkatan produksi peternakan	Produksi Peternakan (Ton)	Ton	29.303,89	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	7.325,97 14.651,95 21.977,92 29.303,89
3.	Meningkatnya Konsumsi pangan yang beragam	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Nilai	89,09	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	- - - 89,9

Sumber : Tim Perencanaan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2024

Tabel II.7
Komponen Anggaran Induk pada Perjanjian Kinerja Perubahan Ke-I Kepala Dinas
Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024

NO	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Produktivitas pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp 10.427.414.412,-	APBD
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp 3.609.360.000,-	APBD
		Program Penyuluhan Pertanian	Rp 3.618.991.600,-	APBD

		Program Perizinan Usaha Pertanian	Rp 521.973.700,-	APBD
		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp 560.968.954,-	APBD
2.	Produksi Peternakan	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp 1.086.905.600,-	APBD
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp 2.563.936.280,-	APBD
3.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Rp 159.407.300,-	APBD
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp 191.714.900,-	APBD
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp 894.877.308,-	APBD
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp 182.294.500,-	APBD
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Program yang tidak termasuk dalam Indikator)	Rp 35.805.928.255,-	APBD

Sumber : Tim Perencanaan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2024

2.5.3. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 (Perubahan ke-II)

Pada tahun 2024, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Reviu dilakukan karena adanya refocusing kegiatan dan realokasi anggaran serta telah ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2024, sehingga perlu melakukan penyesuaian pada kolom Anggaran pada lampiran Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan Berita Acara Perubahan Perjanjian Kinerja (Kedua) Tahun 2024 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung Nomor: BA-002/DPKP/PK/2024 Perjanjian Kinerja Perubahan adalah sebagai berikut:

Tabel II.8
Perjanjian Kinerja Perubahan Ke-II Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Target Triwulan	Target TW
1.	Peningkatan produktivitas pertanian	Produktivitas pertanian (Ton/Ha)	Ton/Ha	6,94	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	- - - 6,94
2.	Peningkatan produksi peternakan	Produksi Peternakan (Ton)	Ton	29.303,89	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	7.325,97 14.651,95 21.977,92 29.303,89
3.	Meningkatnya Konsumsi pangan yang beragam	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Nilai	89,09	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	- - - 89,9

Sumber : Tim Perencanaan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2024

Tabel II.9
Komponen Anggaran Induk pada Perjanjian Kinerja Perubahan Ke-II Kepala Dinas
Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024

NO	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Produktivitas pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp 8.315.768.912,-	APBD-P
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp 1.934.960.800,-	APBD-P
		Program Penyuluhan Pertanian	Rp 2.296.980.800,-	APBD-P
		Program Perizinan Usaha Pertanian	Rp 521.973.700,-	APBD-P
		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp 391.168.954,-	APBD-P
2.	Produksi Peternakan	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp 708.946.700,-	APBD-P
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp 1.854.453.810,-	APBD-P

3.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Rp 0,-	APBD-P
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp 167.711.300,-	APBD-P
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp 240.469.604,-	APBD-P
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp 126.491.600,-	APBD-P
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Program yang tidak termasuk dalam Indikator)	Rp 38.588.440.229,-	APBD-P

Sumber : Tim Perencanaan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2024

Keterangan Tambahan:

1. Indikator Kinerja tidak berubah, namun terdapat perubahan pada Target Kinerja karena menyesuaikan dengan arahan dalam Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor: B274/AA.05/2023 tanggal 27 November 2023 yaitu “Menggunakan informasi capaian kinerja pada laporan kinerja sebagai dasar penentuan Target tahun selanjutnya, penyesuaian aktivitas strategi untuk mencapai kinerja, dan kebutuhan anggarannya”, sehingga dilakukan perubahan. Dibandingkan PK awal, anggaran pada PK Perubahan ke-II berkurang 7.51% sehubungan adanya refocusing Program/Kegiatan non prioritas dan realokasi anggaran untuk pembiayaan Program/Kegiatan prioritas;
2. Data capaian kinerja tersedia pada Triwulan IV;
3. Mengelola Anggaran Dekonsentrasi yaitu:
 - 3.1 Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Ditjen Hortikultura: Rp 177.312.000,-
 - 3.2 Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas Ditjen Tanaman Pangan: Rp 226.169.000,-

- 3.3 Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Ditjen Perkebunan: Rp 129.400.000,-
- 3.4 Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian: Rp 1.378.880.000,-
- 3.5 Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas Badan Pangan Nasional: Rp 2.219.448.000,-

2.6. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja Tahun 2024

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki website resmi yang dapat diakses, baik oleh pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun masyarakat umum dengan alamat <https://distan.babelprov.go.id/>. Di dalam website ini memuat profil lengkap beserta tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain itu juga ditampilkan beberapa kegiatan terbaru yang telah dilakukan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ada juga menu untuk pengaduan, pelayanan masyarakat, dan prosedur pelayanan masyarakat yang dilakukan di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, seperti Lapor (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Masyarakat), Informasi Badan Publik, Berita dan Publikasi, serta Sosial Media Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Gambar 2.1.

Website Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



BAB III

Akuntabilitas Kinerja

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2024

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan pengukuran atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Bapak Pj. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024.

Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kriteria Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Tabel III.2
Capaian Kinerja Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/META INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2022	CAPAIAN 2023	TAHUN 2024				TARGET AKHIR RENSTRA
						TARGET	REALISASI	PERSENTASE	KRITERIA / KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Peningkatan produktivitas pertanian.	Indikator: Produktivitas pertanian Formula Perhitungan: Total luas produksi komoditi pertanian dibagi luas tanam.	Ton/Ha	6,79	6,70	6,94	7,02	101,15 %	Sangat Baik	7.65
2	Peningkatan produksi peternakan.	Indikator: Produksi Peternakan Formula Perhitungan: Total penjumlahan produksi ternak dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. (Ton)	Ton	24.970,07	28.054,02	29.303,89	29.923,4	102,11 %	Sangat Baik	29,303.89
3	Meningkatnya konsumsi pangan yang beragam	Indikator: Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Formula Perhitungan: Nilai yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama untuk memberikan gambaran tentang konsumsi pangan dimasyarakat	Nilai	81,10	87,90	89,09	90,3	101,36 %	Sangat Baik	90.43

4	Meningkatnya tata kelola internal perangkat daerah (DPKP).	<p>Indikator: Nilai RB Perangkat Daerah (DPKP)</p> <p>Formula Perhitungan: Angka yang diperoleh berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai Reformasi Birokrasi (RB) terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.</p>	Nilai	87.49	n/a	n/a	n/a	n/a	<p>Berdasarkan PERMENPANRB Nomor 19 Tahun 2023, dinyatakan bahwa Penilaian RB tidak lagi dilakukan di Tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sehingga Perhitungan Capaian Target Indikator tidak dapat dilakukan, maka indikator ini dihapus.</p>	<p>Disesuaikan melalui Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.4/020/Kpts/Dpkp-I Tentang Indikator Kinerja Utama (Iku) Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026, bahwa indikator kinerja utama (IKU) sasaran ini dihapus.</p>
---	--	--	-------	-------	-----	-----	-----	-----	--	--

Sumber : Tim Perencanaan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2024

Adapun analisis capaian kinerja sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

3.1.1. Sasaran : Peningkatan produktivitas pertanian

Kinerja sasaran peningkatan produktivitas pertanian diukur dengan indikator produktivitas pertanian. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formulasi perhitungan indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.3
Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan (Sasaran 1)

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4
1.	Peningkatan produktivitas pertanian	Produktivitas pertanian	Total luas produksi komoditi pertanian dibagi luas tanam. Produktivitas Pertanian: $(13,9 + 8,87 + 4,51 + 4,03 + 3,32 + 7,48) / 6$ = 7,02 Ton/Ha

Sumber : Tim Perencanaan, Dinas Pertanian dan Ketahanan, 2024

Kinerja sasaran peningkatan produktivitas pertanian diukur dengan menggunakan formulasi perhitungan Total luas produksi komoditi pertanian dibagi luas tanam dari komoditi Hortikultura (13,9+8,87+4,51+7,48 Ton/Ha), Tanaman Pangan (4,03 Ton/Ha) dan Perkebunan (3,31 Ton/Ha) yang merupakan subsektor pertanian. lalu diambil rata-rata dari penjumlahan masing-masing komoditi. Tahun 2024 capaian kinerja sasaran ini adalah **7.02 Ton/ha** atau sebesar **101.15%** dari target 6.94 Ton/ha. Sumber data diolah dari Angka Sementara (ASEM) Statistik Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan hasil perhitungan atas kinerja masing-masing program pendukung sasaran Perangkat Daerah.

Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan pada tahun 2024 terhadap sasaran peningkatan produktivitas pertanian dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel III.4
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 (Sasaran 1)

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2022/ Baseline	2023			2024			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2024 terhadap target 2026
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Produktivitas pertanian	6,79	6.61	6.70	101.29	6.94	7.02	101.15	7.65	91.76%

Sumber : Tim Perencanaan, Dinas Pertanian dan Ketahanan, 2024

Analisis Ketercapaian Sasaran produktivitas pertanian adalah sebagai berikut:

- a. Tercapai 7.02 Ton/ha, dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 101.15 % (melampaui).
- b. Dibandingkan persentase capaian tahun lalu sebesar 101.29% indikator sasaran Produktivitas Pertanian mengalami penurunan sebesar 0.14 %.
- c. Dibandingkan dengan target akhir RENSTRA, diproyeksikan sasaran tercapai.

Keberhasilan capaian Indikator persentase capaian tersebut didukung dari program-program sebagai berikut:

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, dengan sasaran program tersedia dan berkembangnya sarana pertanian, mempunyai Indikator:
 - a. Persentase terawasinya peredaran pupuk, pestisida, alsintan dan sarana pendukung peningkatan produksi. formula perhitungan indikator ini adalah Perbandingan pengawasan peredaran pada tahun berjalan dibanding tahun sebelumnya. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah $(100/100) \times 100 = 100\%$ dari target 100% atau sebesar 100%. Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini sama bila dibandingkan dengan capaian Tahun 2023 yang sebesar 100%.

b. Persentase peningkatan luas tanam tanaman pangan dan hortikultura, formulasi perhitungan indikator ini adalah membandingkan antara luas tanam tahun berjalan (n) dengan tahun sebelum (n-1), dibagi luas tanam tahun sebelum (n-1), dikali 100% lalu diambil rata-rata dari jumlah masing-masing komoditi yang diintervensi oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Dinas Pertanian dan ketahanan pangan. Komoditas Tanaman Pangan dan Hortikultura yang diintervensi oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara lain; padi, jagung, cabai besar, cabai kecil, bawang merah, durian, dan alpukat. Capaian kinerja indikator dapat dilihat melalui perhitungan berikut $\sum \left(\frac{(40+40+10+15+15+300+150)}{14438,25} \right) \times 100 = 3.95\%$ target 2,5% atau sebesar 157,91%. Capaian kinerja pada Tahun 2024 lebih rendah dibandingkan dengan capaian tahun 2023 yang sebesar 4.82%.

c. Persentase peningkatan luas tanam perkebunan, formulasi perhitungan indikator ini adalah membandingkan antara luas tanam komoditas perkebunan yang diintervensi oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Dinas Pertanian dan ketahanan pangan tahun berjalan (n) dengan luas tanam komoditas perkebunan tahun sebelum (n-1), dibagi luas tanam tahun sebelum (n-1), dikali 100%. Komoditi perkebunan yang diintervensi oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2024 adalah Komoditi Kelapa Sawit. Target kinerja untuk indikator ini adalah sebesar 1,5%, Capaian kinerja indikator dapat dilihat melalui perhitungan berikut: $\sum \left(\frac{(97804.19)-(96101.5)}{(97804.19)} \times 100\% \right) = 1,77\%$ dari target 1,5% atau sebesar 118,12%. Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini lebih rendah dibandingkan dengan capaian tahun 2023 yang sebesar 2.45%.

d. Peningkatan benih/bibit tanaman (pangan, horti, dan perkebunan) berlabel dan bersertifikat, perhitungan indikator ini dilakukan dengan cara membandingkan jumlah benih/bibit pertanian berlabel dan bersertifikat tahun berjalan (n), dikurangi jumlah benih/bibit pertanian berlabel dan bersertifikat tahun berjalan ($n - 1$), dibagi jumlah benih/bibit pertanian berlabel dan bersertifikat tahun sebelum ($n - 1$), dikali 100%. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah $\sum \left(\frac{(618561) - (589105)}{(618561)} \times 100\% \right) = 5\%$ dari target 5% atau sebesar 100%. Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini sama bila dibandingkan dengan capaian Tahun 2023 yang sebesar 5%.

Target Tahun 2024 tercapai disebabkan oleh beberapa alasan seperti:

- Terjalannya sinkronisasi dan koordinasi yang baik dengan stakeholder terkait;
- Tersedianya dukungan anggaran dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai;
- Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran petani tentang cara penanganan, pengolahan, dan budidaya yang baik (*Good Agricultural Practices*).

Capaian ini mengalami kendala sebagai berikut:

- Kelompok tani sering dijadikan sebagai alat atau wadah untuk memberikan bantuan/subsidi yang berkaitan dengan program pemerintah sehingga pembentukan dan penumbuhan kelompok tani banyak dilakukan karena adanya proyek bantuan tersebut, sehingga berakhir kelompok tani tidak meningkat kelas kemampuannya atau bahkan tidak berungsi;
- Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan tambang;
- Cuaca ekstrim di Provinsi kepulauan bangka belitung sehingga menyebabkan produksi pertanian menurun.

- Terjadinya refocusing anggaran pada tahun 2024 sehingga menyebabkan adanya beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan seperti; pengadaan bibit kopi sebanyak 39.000 batang, pupuk organik kopi sebanyak 117.000 kilogram dan pestisida sebanyak 1.000 liter.

2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian dengan sasaran program tersedia dan berkembangnya Prasarana Pertanian, mempunyai indikator:

- a. Rasio ketersediaan prasarana pertanian, dengan formulasi perhitungan kebutuhan prasarana pertanian dibagi ketersediaan, dikali 100%. Capaian indikator adalah $\left(\frac{285}{10} \times 100\%\right) = 3.5\%$ dari target 3.5%. Capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 100%. Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini sama bila dibandingkan dengan capaian Tahun 2023 sebanyak 3.5% atau tercapai 100%.

Target Tahun 2024 tercapai disebabkan oleh beberapa alasan seperti:

- Terjalannya sinkronisasi dan koordinasi yang baik dengan stakeholder terkait;
- Tersedianya Petugas/Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompetan/memadai.

Capaian ini mengalami kendala sebagai berikut:

- Terjadinya Perubahan Anggaran Kegiatan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di tingkat Provinsi dari Rp 392.000.000,- menjadi Rp 0,- dikarenakan Refocusing Kegiatan Non Prioritas.

3. Program Perizinan Usaha Pertanian dengan sasaran program peningkatan produktivitas pertanian mempunyai indikator dokumen perizinan usaha pertanian. Formula perhitungan adalah

jumlah dokumen perizinan usaha pertanian. Capaian indikator kinerja adalah 1 dokumen dari target sebesar 1 dokumen. Capaian kinerja pada tahun 2024 sebesar 100% sama bila dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2023 yaitu 1 dokumen.

Target Tahun 2024 tercapai disebabkan oleh beberapa alasan seperti:

- Terjalannya sinkronisasi dan koordinasi yang baik dengan stakeholder terkait;
- Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian.

Capaian ini mengalami kendala sebagai berikut:

- Terdapat perbedaan standar satuan biaya (SSB) sehingga penyerapan anggaran tidak dapat diserap secara maksimal.

4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian dengan sasaran program peningkatan produktivitas pertanian mempunyai Indikator kinerja:

- a. Dokumen laporan pengendalian dan penanggulangan Dampak Perubahan Iklim (DPI), formula perhitungan indikator ini adalah jumlah laporan pengendalian dan penanggulangan Dampak Perubahan Iklim (DPI). Capaian indikator kinerja adalah 1 dokumen dari target 1 dokumen. Capaian kinerja pada tahun 2024 ini sama dengan capaian kinerja pada tahun 2023 sebanyak 1 dokumen atau tercapai 100%.
- b. Terkendalnya Bencana Pertanian akibat serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), formula perhitungan indikator ini adalah jumlah Persentase perbandingan antara target luas lahan (Ha) yang terkendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) pada komoditi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dengan realisasi jumlah Luasan (Ha) Bahan Pengendali OPT yang didistribusi dan dimanfaatkan ke Poktan dan Gapoktan. Capaian indikator kinerja ini adalah 4.19% dari target 3%. Capaian kinerja

pada tahun 2024 ini lebih rendah dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2023 yang sebesar 5%.

Target Tahun 2024 tercapai disebabkan oleh beberapa alasan seperti:

- Terjalannya sinkronisasi dan koordinasi yang baik dengan stakeholder terkait, serta dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai;
- Terlaksananya Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan.

Capaian ini mengalami kendala sebagai berikut:

- Terjadinya Pengurangan Anggaran Yang disebabkan Refocusing Kegiatan Non Prioritas;
- Kurangnya kesadaran petani untuk mengasuransikan usahanya;
- Masih kurangnya pengetahuan petani terkait pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT).

5. Program Penyuluhan Pertanian dengan sasaran program peningkatan produktivitas pertanian mempunyai Indikator Persentase peningkatan metode, teknologi informasi dan kelembagaan penyuluhan pertanian. Formula perhitungan indikator ini adalah Persentase Jumlah penerapan informasi teknis dan inovasi pertanian yang diterapkan pada Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu 32 penerapan di 32 BPP = $(32+32)/2 \times 100 = 100\%$ dari target sebesar 100%. Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini lebih besar dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2023 yang sebesar 90%.

Target Tahun 2024 tercapai disebabkan oleh beberapa alasan seperti:

- Adanya peningkatan kinerja penyuluh pertanian lapangan dalam melakukan pengawalan dan pendampingan kelompok tani;

- Banyaknya sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis dan informasi yang dapat di akses dari media online untuk meningkatkan ilmu dan pengetahuan SDM (petani/penyuluh).

Capaian ini mengalami kendala sebagai berikut:

- Penghapusan sub kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian dan sub kegiatan Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian dikarenakan Refocusing Kegiatan Non Prioritas;
- Rendahnya kesadaran SDM (petani) untuk mempelajari hal-hal baru terutama yang berkaitan dengan teknologi.

Tabel III.5
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja PD dengan Nasional Tahun 2024 (Sasaran I)

No	Indikator dan Formula Perhitungan	Target Nasional	Target PD	Realisasi Nasional	Realisasi PD	Capaian Nasional	Capaian PD
1.	Total luas produksi komoditi pertanian dibagi luas tanam. Produktivitas Pertanian: $(13,9 + 8,87 + 4,51 + 4,03 + 3,32 + 7,48) / 6$ = 7,02 Ton/Ha	7.5	6,94	7.67	7.02	102.27 %	101.15 %

Sumber : Tim Perencanaan, Dinas Pertanian dan Ketahanan, 2024

- Jika dibandingkan dengan target Nasional, Target indikator Produktivitas Pertanian berada dibawah Target Nasional.
- Jika dibandingkan dengan Realisasi Nasional Target indikator Produktivitas Pertanian berada dibawah Realisasi Nasional.
- Sebagai kesimpulan capaian indikator Produktivitas Nasional berada dibawah capaian Nasional yaitu sebesar 101.15 %. Hal tersebut disebabkan karena Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bukan merupakan daerah Sentra Produksi Pertanian.

3.1.1.1. Data Dukung Capaian Produktivitas Pertanian (Indikator ke I) Melalui Program

Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian melekat pada Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Bidang Perkebunan, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, UPTD Balai Benih Pertanian, UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Benih. Kegiatan sebagai berikut, yaitu :

- a. Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian dengan anggaran sebesar Rp 514.821.700,-;
- b. Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman dengan anggaran sebesar Rp 7.773.263.412,-;
- c. Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi dengan anggaran kegiatan sebesar Rp 27.683.800,-.

Gambar III.1
Dokumentasi Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian (Sasaran I)

No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
1		Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian



Kegiatan Pengawasan
Mutu, Penyediaan dan
Peredaran Benih Tanaman

3		<p>Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi</p>
---	--	--

Sumber : Humas, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2024

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian melekat pada Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian. Kegiatan sebagai berikut, yaitu :

- a. Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian dengan anggaran sebesar Rp 1.934.960.800,-.

Gambar III.2
Dokumentasi Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
1		<p>Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian</p>



Sumber : Humas, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2024

Program Perizinan Usaha Pertanian melekat pada Bidang Perkebunan. Kegiatan sebagai berikut, yaitu :

- a. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp 521.973.700,-.

Gambar III.3
Dokumentasi Program Perizinan Usaha Pertanian

No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
1		Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sumber : Humas, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2024

Program Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian melekat pada Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian dan UPTD Balai Proteksi Tanaman. Kegiatan sebagai berikut, yaitu :

- a. Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi dengan anggaran sebesar Rp 391.168.954,-.

Gambar III.4
Dokumentasi Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
1		Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi

Sumber : Humas, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2024

Program Penyuluhan Pertanian melekat pada Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian. Kegiatan sebagai berikut, yaitu :

- a. Kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian dengan anggaran sebesar 2.296.980.800,-.

Gambar III.5
Dokumentasi Program Penyuluhan Pertanian

No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
1	 <p>Pangkalpinang, 30 Agustus 2024 Penyuluh Pertanian Babel Kompeten</p>  <p>Bangka Tengah, 28 Februari 2024 KAJI TERAP CABAI DI BPP NAMANG</p>  <p>Bangka, 29 Oktober 2024 Panen Cabai SL-GAP di Balai Benih Pertanian</p>  <p>Bangka, 29 Oktober 2024</p>  <p>Bangka, 02 Mei 2024 PEMBUKAAN SL-GAP CABAI MERAH</p>	<p align="center">Kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian</p>

Sumber : Humas, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2024

3.1.2. Sasaran : Peningkatan produksi peternakan

Kinerja sasaran peningkatan populasi peternakan diukur dengan indikator produksi peternakan. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formulasi perhitungan adalah sebagai berikut:

Tabel III.6
Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan (Sasaran 2)

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4
1.	Peningkatan produksi peternakan.	Produksi Peternakan	<p>Formula Perhitungan: Total penjumlahan produksi ternak dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. (Ton).</p> <p>Produksi Peternakan: $(2.304.794,13 \text{ Kg} + 2.761.8602,4 \text{ Kg}) / 1000$ = 29.923,40 Ton</p>

Sumber : Tim Perencanaan, Dinas Pertanian dan Ketahanan, 2024

Kinerja sasaran peningkatan populasi peternakan diukur dengan menggunakan formulasi perhitungan Penjumlahan Produksi ternak yang dihasilkan dalam periode waktu 1 (satu) tahun. Capaian kinerja sasaran ini adalah **29.923,40 Ton** atau sebesar **102.11%** dari target 29.303,89 Ton. Sumber data diolah dari hasil perhitungan atas kinerja masing-masing program pendukung sasaran Perangkat Daerah. Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan terhadap sasaran peningkatan produksi peternakan pada tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel III.7
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 (Sasaran 2)

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2022/ Baseline	2023			2024			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2024 terhadap target 2026
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Produktivitas pertanian	24.970,07	25.294,27	28.054,03	110.91	29.303,89	29.923,40	102,11	29.303,89	102,11

Sumber : Tim Perencanaan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2024

Analisis Ketercapaian Sasaran peningkatan Produksi peternakan adalah sebagai berikut:

- a. Tercapai 29.923,40 Ton, dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 102.11%. (melampaui).
- b. Dibandingkan persentase capaian tahun lalu sebesar 110.91% indikator sasaran produksi peternakan mengalami penurunan sebesar 8.8 %.
- c. Dibandingkan dengan target akhir RENSTRA, diproyeksikan sasaran tercapai.

Keberhasilan capaian Indikator persentase peningkatan capaian tersebut didukung dari program-program sebagai berikut:

1. Program Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, dengan sasaran program tersedia dan berkembangnya sarana pertanian, mempunyai Indikator:
 - a. Persentase pertambahan angka populasi ternak, formulasi perhitungan indikator ini adalah perbandingan angka populasi ternak tahun berjalan (n) dibandingkan dengan tahun sebelum ($n - 1$), dibagi angka populasi ternak tahun sebelum ($n - 1$), dikali 100%. Target kinerja untuk indikator ini adalah sebesar 5%, Capaian kinerja untuk indikator ini adalah $\Sigma \left(\frac{(19741 - 18710)}{(18710)} \times 100\% \right) = 5.5\%$ dari target 5% atau sebesar 110,21%. Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini lebih tinggi dibandingkan dengan capaian tahun 2023 yang sebesar 5%..
 - b. Persentase Peningkatan produksi benih bermutu, formulasi perhitungan indikator ini adalah jumlah produksi benih/bibit bermutu tahun berjalan (n) dibandingkan dengan jumlah produksi benih/bibit bermutu tahun sebelum ($n-1$) dibagi jumlah produksi benih/bibit bermutu tahun sebelum ($n-1$), dikali 100%. Target kinerja untuk indikator ini adalah sebesar 2.5 %, Capaian kinerja untuk indikator ini adalah

$\Sigma \left(\frac{(102 - 99)}{(102)} \times 100\% \right) = 2,94\%$ d dari target 2,5% atau sebesar 117,65%. Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini lebih rendah dibandingkan dengan capaian tahun 2023 yang sebesar 3,85%.

Target Tahun 2024 tercapai disebabkan oleh beberapa alasan seperti:

- Terjalannya sinkronisasi dan koordinasi yang baik dengan stakeholder terkait;
- Meningkatnya produksi ternak dalam daerah;
- Meningkatnya nilai angka ketersediaan suplay bibit ternak di UPTD Balai Benih Pertanian tahun 2024;

Capaian ini mengalami kendala sebagai berikut:

- Terjadinya Refocusing Kegiatan untuk efisiensi anggaran TA 2024 yang menyebabkan perubahan output kegiatan pengadaan bibit ternak (sapi) dari 100 Ekor menjadi 60 ekor menyesuaikan dengan dukungan anggaran yang tersedia.

2. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan sasaran program peningkatan produksi peternakan mempunyai Indikator persentase penurunan kasus penyakit hewan menular dengan target penurunan 2%. Formulasi perhitungan indikator ini adalah jumlah kejadian penyakit kasus tahun berjalan (t) dikurangi jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) dibagi jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) dikali 100%. Capaian indikator kinerja adalah 4% dari target 2% atau sebesar 200%. Perhitungannya adalah hasil capaian penurunan kasus PMK thn 2024 mencapai 96%, sedangkan penurunan kasus pada 2023 mencapai 95%. Penghitungannya berupa $(96-95)/95 \times 100\% = 4\%$ Capaian kinerja pada Tahun 2024 lebih rendah dibandingkan capaian tahun 2023 yang sebesar 11%.

Target Tahun 2024 tercapai disebabkan oleh beberapa alasan seperti:

- Terjalannya sinkronisasi dan koordinasi yang baik dengan stakeholder terkait;
- Pelaksanaan vaksin dan pemberian obat kepada hewan ternak sapi, kambing, dan kerbau untuk mencegah perluasan penyebaran Penyakit.
- Meningkatnya nilai angka ketersediaan suplay bibit ternak di UPTD Balai Benih Pertanian tahun 2024.

Capaian ini mengalami kendala sebagai berikut:

- Terjadinya refocusing kegiatan untuk efisiensi anggaran TA 2024;
- Terjadinya Penyakit Mulut dan Kuku dan *Lumpy Skin Disease* sudah ditetapkan sebagai wabah dan penyebarannya yang masif.

Tabel III.8
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja PD dengan Nasional Tahun 2024 (Sasaran 2)

No	Indikator dan Formula Perhitungan	Target Nasional	Target PD	Realisasi Nasional	Realisasi PD	Capaian Nasional	Capaian PD
1.	Formula Perhitungan: Total penjumlahan produksi ternak dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. (Ton). Produksi Peternakan: (2.304.794,13 Kg + 2.761.8602,4 Kg) / 1000 = 29.923,40 Ton	477.460	29.303,89	496.250	29.923,40	103.94 %	102,11 %

Sumber : Tim Perencanaan, Dinas Pertanian dan Ketahanan, 2024

- Jika dibandingkan dengan target Nasional, Target indikator Produksi Peternakan berada dibawah Target Nasional.
- Jika dibandingkan dengan Realisasi Nasional Target indikator produksi peternakan berada dibawah Realisasi Nasional.
- Sebagai kesimpulan capaian indikator Produksi Peternakan berada dibawah capaian Nasional yaitu sebesar 102.11%. Hal ini dikarenakan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bukan merupakan daerah Sentra produksi peternakan.

3.1.2.1. Data Dukung Capaian Produksi Peternakan (Indikator ke 3) Melalui Program

Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian melekat pada Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan UPTD Balai Benih Tanaman. Kegiatan sebagai berikut, yaitu :

- a. Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain dengan anggaran sebesar Rp 1.254.453.810,-;
- b. Kegiatan Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan dengan anggaran sebesar Rp 600.000.000,-.

Gambar III.6
Dokumentasi Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian (Sasaran 2)

No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
1		Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain

Sumber : Humas, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2024

Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner melekat pada Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Kegiatan sebagai berikut, yaitu :

- a. Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp 240.332.400,-;
- b. Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp 194.280.400,-;
- c. Kegiatan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan dengan anggaran sebesar Rp 274.333.900,-

Gambar III.7
Dokumentasi Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
1		<p>Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</p>

2		<p>Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi</p>
3		<p>Kegiatan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan</p>

Sumber : Humas, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2024

3.1.3. Sasaran : Meningkatnya Konsumsi pangan yang beragam

Kinerja sasaran meningkatnya konsumsi pangan yang beragam diukur dengan indikator Skor Pola Pangan (PPH) Konsumsi yaitu Nilai yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama untuk memberikan gambaran tentang konsumsi pangan dimasyarakat dengan perhitungan (n-1). Penjelasan

hubungan sasaran, indikator dan formulasi perhitungan indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.9
Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan (Sasaran 3)

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4
1.	Meningkatnya konsumsi pangan yang beragam	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	<p>Formula Perhitungan: Pengolahan Nilai yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama untuk memberikan gambaran tentang ketersediaan pangan dimasyarakat.</p> <p>Hasil perkalian antara proporsi energi dari masing-masing kelompok pangan diolah melalui aplikasi Pola Konsumsi Pangan dan diperoleh skor PPH konsumsi tahun 2024 sebesar 90.30</p>

Sumber : Tim Perencanaan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2024

Kinerja sasaran peningkatan Meningkatnya ketersediaan pangan yang beragam diukur dengan menggunakan formulasi pengolahan data sumbangan energi kelompok pangan Proporsi konsumsi energi untuk masing-masing kelompok hasil kesepakatan DEPTAN tahun 2001 yaitu: (1) Padi-padian 50%, (2) Umbi-umbian 6%, (3) Pangan hewani 12%, (4) Minyak dan lemak 10%, (5) Buah dan biji berminyak 3%, (6) Kacang-kacangan 5%, (7) Gula 5%, (8) Sayur dan buah 6%, serta (9) Lain-lain (bumbu) 3%. Selanjutnya, hasil perkalian antara proporsi energi dari masing-masing kelompok pangan berdasarkan data Susenas diolah melalui aplikasi Pola Konsumsi Pangan dan diperoleh skor PPH Konsumsi sebesar **90,30** dengan persentase realisasi sebesar **101.36%** terhadap target tahun 2024 yaitu 89,09. Dibandingkan capaian target skor PPH Konsumsi tahun 2023 sebesar 87,90 terjadi peningkatan sebesar 2.73%.

Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan terhadap sasaran Meningkatnya konsumsi pangan yang beragam pada tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel III.10
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 (Sasaran 3)

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2022/ Baseline	2023			2024			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2024 terhadap target 2026
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Skor PPH konsumsi	83.1	86.48	87.90	101.64	89,09	90.3	101,36 %	90.43	99,86%

Sumber : Tim Perencanaan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2024

Analisis Ketercapaian Sasaran meningkatnya konsumsi pangan yang beragam adalah sebagai berikut:

- a) Tercapai skor PPH Konsumsi sebesar 90.30 dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 101.36% (melampaui);
- b) Dibandingkan persentase capaian tahun lalu sebesar 101.64% indikator skor PPH Konsumsi mengalami penurunan sebesar 0.28 %;
- c) Dibandingkan dengan target akhir RENSTRA, diproyeksikan sasaran tercapai.

Keberhasilan capaian Indikator persentase capaian tersebut didukung dari program-program sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan sasaran program meningkatnya konsumsi pangan yang beragam mempunyai Indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH). Formula perhitungan indikator ini adalah Pengolahan nilai yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama melalui aplikasi Pola Konsumsi Pangan. Capaian indikator kinerja adalah 90.3 dari target sebesar 84.1 dengan persentase capaian 107,37%. Capaian kinerja tahun 2024 ini meningkat bila dibandingkan capaian kinerja tahun 2023 yang sebesar 87.9.

Capaian ini didukung oleh :

- Gencarnya promosi penganeekaragaman konsumsi pangan lokal.

- Koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan baik pusat maupun daerah sehingga program kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik;

Capaian ini mengalami kendala sebagai berikut:

- Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pola konsumsi ideal masyarakat yang dianjurkan.

2. Program Penanganan Kerawanan Pangan dengan sasaran program meningkatnya konsumsi pangan yang beragam mempunyai Indikator Menurunnya daerah rentan rawan pangan. Formula perhitungan indikator ini adalah persentase menurunnya daerah rentan rawan pangan tahun berjalan dibandingkan tahun awal Renstra. Capaian indikator kinerja adalah $(5 - 10) = -5$ Daerah dari target sebanyak 1 Daerah atau persentase capaian sebesar -500%. Daerah rentan rawan pangan meningkat dari 5 kecamatan di Tahun 2023 menjadi 10 kecamatan di Tahun 2024 dikarenakan adanya perubahan indikator dan cara perhitungan pada aplikasi FSVA (Konversi GKG ke beras) sehingga tidak dapat dilakukan perhitungan indikator. Capaian kinerja pada Tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2023 karena terjadi perubahan cara perhitungan indikator dari Badan Pangan Nasional.

Target Tahun 2024 tidak tercapai disebabkan oleh beberapa alasan seperti:

- Perubahan cara perhitungan indikator dan klasifikasi daerah “Rentan rawan pangan” aplikasi FSVA (*Food Security and Vulnerability Atlas*) Badan Pangan Nasional, sehingga menyebabkan klasifikasi daerah Rentan Rawan Pangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bertambah;
- Menurunnya kondisi ekonomi masyarakat di Provinsi Bangka Belitung secara global yang berimbas kepada penurunan kemampuan daya beli masyarakat terhadap pangan.

Capaian ini mengalami kendala sebagai berikut:

- Terjadinya refocusing kegiatan untuk efisiensi anggaran TA 2024;
 - Bangka Belitung sebagai daerah kepulauan sangat tergantung dengan ketersediaan pasokan pangan dari luar daerah.
3. Program Pengawasan Keamanan Pangan dengan sasaran program meningkatnya konsumsi pangan yang beragam mempunyai Indikator persentase pangan yang aman dikonsumsi. Formula perhitungan indikator ini adalah bobot pengawasan di peredaran (60%) dijumlahkan dengan bobot registrasi dan sertifikasi (40%) pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan. Capaian indikator kinerja adalah $((70\%)+(16\%)) = 86\%$ dari target sebesar 86% atau persentase capaian sebesar 100%. Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini lebih tinggi dari capaian kinerja tahun 2023 yaitu sebesar 85.77%.

Target Tahun 2024 tercapai disebabkan oleh beberapa alasan seperti:

- Tingginya tingkat kesadaran stakeholder/pelaku usaha pertanian untuk mendaftarkan usahanya guna mendapatkan Sertifikat Prima 3;
- Koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan baik pusat maupun daerah sehingga program kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik;

Capaian ini mengalami kendala sebagai berikut:

- Terjadinya refocusing kegiatan non prioritas untuk efisiensi anggaran TA 2024;
- Penggunaan pestisida atau pupuk kimia yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan, mengakibatkan produk pertanian yang dihasilkan memiliki kadar kandungan bahan kimia yang tinggi sehingga memiliki risiko yang berdampak pada kesehatan apabila dikonsumsi.

Tabel III.11
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja PD dengan Nasional Tahun 2024 (Sasaran 3)

No	Indikator dan Formula Perhitungan	Target Nasional	Target PD	Realisasi Nasional	Realisasi PD	Capaian Nasional	Capaian PD
1.	<p>Formula Perhitungan: Pengolahan Nilai yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama untuk memberikan gambaran tentang ketersediaan pangan dimasyarakat.</p> <p>Hasil perkalian antara proporsi energi dari masing-masing kelompok pangan diolah melalui aplikasi Pola Konsumsi Pangan dan diperoleh skor PPH konsumsi tahun 2024 sebesar 90.30</p>	95.2	89,09	93.48	90.3	98.19 %	101,36 %

Sumber : Tim Perencanaan, Dinas Pertanian dan Ketahanan, 2024

- a. Jika dibandingkan dengan target Nasional, Target indikator Skor PPH Konsumsi berada dibawah Target Nasional.
- b. Jika dibandingkan dengan Realisasi Nasional Target indikator Skor PPH Konsumsi berada dibawah Realisasi Nasional.
- c. Sebagai kesimpulan capaian indikator Skor PPH Konsumsi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 90.30 masih berada dibawah capaian Skor PPH Konsumsi Nasional yaitu sebesar 93.48.

3.1.3.1. Data Dukung Capaian Skor PPH Konsumsi (Indikator ke 3) Melalui Program

Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat melekat pada Bidang Ketahanan Pangan. Kegiatan sebagai berikut, yaitu :

- a. Kegiatan Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi dengan anggaran sebesar Rp 240.469.604,-.

Gambar III.8
Dokumentasi Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat





No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
1	    	<p align="center"> Kegiatan Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi </p>

Sumber : Humas, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2024

Program Program Penanganan Kerawanan Pangan melekat pada Bidang Ketahanan Pangan. Kegiatan sebagai berikut, yaitu :

- a. Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi dengan anggaran sebesar Rp 167.711.300,-.

Gambar III.9
Dokumentasi Program Penanganan Kerawanan Pangan

No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
1	   	Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi (Penyerahan Bantuan Kepada daerah Rentan Rawan Pangan)

Sumber : Humas, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2024

Program Pengawasan Keamanan Pangan melekat pada UPTD Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan. Kegiatan sebagai berikut, yaitu :

- a. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp 126.491.600,-.

Gambar III.10
Dokumentasi Program Pengawasan Keamanan Pangan

No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
1	 <p>Pangkalpinang, 26 November 2024 Rapat Teknis OKKP-D</p> <p>Pangkalpinang, 14 Agustus 2024 Rakor Registrasi dan Sertifikasi PSAT</p> <p>Pangkalpinang, 14 Agustus 2024 Rakor Registrasi dan Sertifikasi PSAT</p> <p>Pangkalpinang, 20 Desember 2024 Sidak Bahan Pangan Pokok Jelang Nataru</p>	<p>Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota</p>

Sumber : Humas, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2024

3.1.4. Sasaran : Meningkatnya tata kelola internal perangkat daerah (DPKP)

Kinerja sasaran Meningkatnya tata kelola internal perangkat daerah (DPKP) diukur berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai Reformasi Birokrasi (RB) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagai tolak ukur pemerintah untuk mencapai *good governance*. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formulasi perhitungan indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.12
Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan (Sasaran 4)

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4
1.	Meningkatnya tata kelola internal perangkat daerah (DPKP).	Nilai RB Perangkat Daerah (DPKP)	Angka yang diperoleh berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai Reformasi Birokrasi (RB) terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Sumber : Tim Perencanaan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2024

Kinerja sasaran Meningkatnya tata kelola internal perangkat daerah (DPKP) diukur dengan menggunakan formulasi penjumlahan nilai komponen pengungkit yang terdiri dari aspek pemenuhan dan aspek reform berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023, dinyatakan bahwa Penilaian RB tidak lagi dilakukan di Tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sehingga Perhitungan Capaian Target Indikator Tahun 2024 **tidak dapat dilakukan/tidak diketahui**. Maka demi keselarasan dokumen, dibuat SK Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.4/020/Kpts/DPKP-I Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang menerangkan bahwa indikator Nilai RB Perangkat Daerah (DPKP) **tidak lagi digunakan**. Dibandingkan dengan capaian nilai RB Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tahun 2023, capaian nilai RB DPKP tahun 2024 **tidak dapat diperbandingkan**. Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan terhadap sasaran Meningkatnya tata kelola internal perangkat daerah (DPKP) pada tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel III.13
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 (Sasaran 4)

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2022/ Baseline	2023			2024			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2024 terhadap target 2026
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Nilai RB perangkat daerah (DPKP)	87.49	-	not available (n/a)	not available (n/a)	-	not available (n/a)	not available (n/a)	-	Indikator tidak lagi digunakan sejak tahun 2023

Sumber : Tim Perencanaan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2024

Analisis Ketercapaian Sasaran meningkatnya tata kelola internal perangkat daerah (DPKP) adalah sebagai berikut:

- Nilai RB perangkat daerah (DPKP) tahun 2024 tidak diketahui, dengan demikian prosentase realisasi terhadap target tidak dapat diukur;
- Dibandingkan persentase capaian tahun lalu, indikator Nilai RB perangkat daerah (DPKP) tidak dapat diperbandingkan;
- Dibandingkan dengan target akhir RENSTRA, diproyeksikan sasaran tidak tercapai/tidak dapat diukur.

Capaian Indikator tersebut didukung dari program-program sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, yang mempunyai sasaran tertunjangnya urusan pemerintahan daerah provinsi dengan indikator:
 - a. Nilai SAKIP Perangkat Daerah (DPKP). Formula perhitungan indikator ini adalah Penjumlahan nilai fakta objektif pemerintah dalam mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja yang didapatkan dari hasil audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 700/95/LHE/ITDA/2024, Capaian kinerja untuk indikator ini didasarkan penjumlahan dari 4 (empat) komponen penilaian yaitu: 1) Perencanaan Kinerja; 2) Pengukuran Kinerja; 3) Pelaporan Kinerja, dan 4) Evaluasi Kinerja dengan perhitungan $(21,60 + 23,70 + 12,45 + 20,50) = 78,25$ dari target 81,29 atau sebesar 96,26%. Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini lebih tinggi dibandingkan pada Tahun 2023 yang sebesar 77,76
 - b. Nilai Survei Kepuasan Pelayanan Internal. Formula perhitungan indikator ini adalah rata-rata nilai survei kepuasan pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan terhadap 4 (Empat) aspek, yaitu: a. Pelayanan keuangan; b. Pelayanan kepegawaian; c. Pelayanan umum; dan d. Penyediaan jasa penunjang; maka didapat nilai rata-rata sebesar 80 dengan kategori “Memuaskan”. Capaian indikator kinerja adalah 100% dari target tahun 2024 yaitu 80. Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini sama bila dibandingkan dengan capaian Tahun 2023 yang sebesar 80.

Capaian ini didukung oleh:

- Dukungan regulasi dari Pemerintah Pusat maupun Daerah yang mampu mengakomodir setiap program kegiatan yang dilaksanakan;
- Dukungan Sumberdaya Manusia (SDM) Dinas Pertanian dan

Ketahanan Pangan yang kompeten dan berkualitas dalam pelaksanaan tugas;

- Koordinasi sektoral dan lintas sektor yang kondusif sehingga program kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik;
- Ketersediaan sarana prasarana serta ketersediaan perangkat yang memudahkan dalam pekerjaan-pekerjaan yang berbasis teknologi informasi;
- Adanya komitmen dari pimpinan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan jasa penunjang;
- Dukungan anggaran untuk Perangkat Daerah, khususnya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
- Koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan baik pusat maupun daerah sehingga program kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik;

Capaian ini mengalami kendala sebagai berikut:

- Revisi anggaran/Refocussing (Pengurangan dan Penambahan) secara bertahap, sehingga beberapa agenda yang sudah direncanakan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal dan harus dilakukan penyesuaian;
- Lamanya waktu pengesahan DPA Perubahan yang baru terbit di bulan Oktober Tahun 2024, sehingga pelaksanaan kegiatan tidak maksimal;
- Adanya kebijakan pemerintah pusat tentang monatorium jabatan fungsional baru serta penyetaraan jabatan struktural (Eselon IV) ke Jabatan Fungsional Tertentu (JFT), sehingga membutuhkan penyesuaian lebih lanjut.

3.1.4.1 Data Dukung Capaian Nilai RB perangkat daerah (Indikator ke 4) Melalui Program

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi melekat pada Sekretariat Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Kegiatan sebagai berikut, yaitu :

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp 70.904.500,-;
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp 31.399.740.024,-;
- c. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp 34.096.000,-;
- d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp 84.000.000,-;
- e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp 671.444.095,-;
- f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp 21.013.700,-;
- g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar Rp 5.349.665.810,-;
- h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar Rp 957.576.100,-.

3.2. Efisiensi Anggaran

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel III.14
Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi	Ket
			Target	Realisasi	Realisasi (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Peningkatan produktivitas pertanian	Produktivitas pertanian	6,94	7.02	101,15 %	Rp13.460.853.166,-	Rp11.893.148.189,-	88.35%	Rp1.567.704.977,-	Tercapai
2	Peningkatan produksi peternakan.	Produksi Peternakan	29.303,89	29.923,49	102,11 %	Rp2.563.400.510,-	Rp2.346.775.776,-	91.55%	Rp216.624.734,-	Tercapai
3	Meningkatnya konsumsi pangan yang beragam	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	89,09	90,3	101,36 %	Rp534.672.504,-	Rp422,256,798,-	78.97%	Rp112.415.706,-	Tercapai
4	Meningkatnya tata kelola internal perangkat daerah (DPKP).	Nilai RB Perangkat Daerah (DPKP)	-	<i>not available</i> (n/a)	<i>not available</i> (n/a)	Rp38.588.440.229,-	Rp36.806.916.066,-	95.38%	Rp1.781.524.163,-	Indikator kinerja tidak dihitung, disebabkan perubahan kebijakan dari pusat
Total Belanja						Rp55.147.366.409,-	Rp51.469.096.829,-	93.33%	Rp3.678.269.580,-	

Sumber : <http://SIPD>, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun, Laporan Keuangan Tahun 2024

Berdasarkan tabel III.14 di atas capaian kinerja sasaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melampaui target kinerja tahun 2024 dengan target anggaran belanja program/kegiatan yang terkait langsung pada pencapaian sasaran sebesar Rp 55.147.366.409,- terealisasi Rp 51.476.324.529,- atau 93.34% sehingga dapat dikatakan terdapat efisiensi Rp 3.671.041.880,- atau 6.66% yang bersumber dari:

- Refocusing kegiatan non prioritas;
- Sisa pengadaan barang dan jasa;
- Efisiensi belanja perjalanan dinas;
- Efisiensi honor narasumber;
- Efisiensi sewa tempat;
- Efisiensi biaya makanan dan minuman.
- Dll..

3.3. Tindak lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024

Tabel III.15
Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024

No.	Saran/Rekomendasi	Tindak Lanjut
1.	<p>Surat Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 700/95/LHE/ITDA/2024 Hal Laporan Hasil Evaluasi atas AKIP pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tanggal 04 April 2024.</p> <p>Rekomendasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengupload Dokumen Perencanaan dan Pengawasan dalam website Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; Memperbaiki Rumusan Sasaran-Program dalam cascading dan Renstra; 	<p>Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pencapaian target kinerja (output dan outcome) Tahun 2024 dengan langkah-langkah:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyusun Dokumen Cascading Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023-2026; Merumuskan kembali Sasaran Program/Kegiatan dalam Cascading dan Renstra dengan menyusun dokumen Renstra Perubahan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026; Melaksanakan Rapat Pimpinan Lingkup Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka untuk mengevaluasi Indikator Kinerja yang belum memenuhi kriteria SMART, dan memperbaiki indikator Program/Kegiatan tersebut dalam Dokumen Renstra Perubahan Dinas Pertanian dan Ketahanan

<ul style="list-style-type: none"> 4. Memperbaiki Indikator Kinerja Yang Belum SMART; 5. Menyajikan data kinerja yang mendukung capaian kinerja; 6. Menindaklanjuti Rekomendasi Tahun Sebelumnya dan Tahun ini; 7. Untuk melakukan Reviu Laporan Kinerja Tahun 2023; 8. Untuk Membuat Aplikasi Evaluasi AKIP. 	<p>Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026;</p> <ul style="list-style-type: none"> 4. Melaksanakan Rapat Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi berkala per Triwulan yang melibatkan Pejabat eselon dan PPK/PPTK di lingkup Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan; 5. Rekomendasi dari Tim Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Terhadap Hasil Evaluasi atas AKIP Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023 telah ditindaklanjuti. Rekomendasi AKIP dari Tim Inspektorat di tahun 2024 akan dibuatkan Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) dan dimonitoring secara berkala; 6. Melaksanakan Rapat Pimpinan Lingkup Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka untuk melakukan Reviu Terhadap Laporan Kinerja Tahun 2023, serta melakukan review/evaluasi mandiri oleh Tim AKIP Internal Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; 7. Aplikasi Evaluasi AKIP untuk OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah dilakukan melalui aplikasi Sistem Pengendalian Evaluasi Perencanaan dan Sakip Terintegrasi (SIPENA SAKTI) dan aplikasi eSakip Babel yang dikoordinir oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk dilakukan penginputan setiap 3 bulan (triwulanan) oleh seluruh OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
--	--

Sumber : Surat Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 700/95/LHE/ITDA/2024

3.4. Inovasi

Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparatur untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka inovasi yang telah dikembangkan dalam pencapaian sasaran kinerja antara lain:

- a. Inovasi **SEMARAK BABEL** (Semangat Menanam Rakyat Bangka Belitung) dengan slogan “Babel Betanem, Babel Bekebon” sebagai bentuk komitmen bersama untuk mendukung penanaman dan pengembangan komoditi

cabai sebagai upaya pengendalian inflasi di Daerah;



- b. Inovasi **KETAPANG BERGEMA** (Ketahanan Pangan Bergerak Bersama) sebagai bentuk kolaborasi dan apresiasi bagi desa-desa yang turut berkontribusi aktif dalam kegiatan ketahanan pangan, serta sebagai bentuk komitmen bersama Stakeholder dan pihak-pihak terkait untuk mewujudkan ketahanan pangan desa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



- c. Inovasi **MATA RANTING** (Makain Telur Antisipasi Risiko Anak Stunting) sebagai bentuk usaha untuk pencegahan anak stunting dengan memanfaatkan CSR PT. Charoen Phokphand Bangka berupa pemberian Telur Ayam untuk lokus-lokus Stunting berdasarkan data Elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM). Pada tanggal 10 Oktober 2024, Pj. Gubernur Babel Sugito, S.Sos, M.H. melaunching Inovasi Program “MATA RANTING” Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bertempat di Halaman Kantor Wali Kota Pangkalpinang. Program “MATA RANTING” ditindaklanjuti dengan membagikan 56.000 Butir Telur kepada Masyarakat di 27 Kecamatan Lokus Stunting yang tersebar pada 4 Kabupaten/Kota.



3.5. Penghargaan

Sepanjang Tahun 2024, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah berhasil mendapat berbagai penghargaan antara lain sebagai berikut:

1. Penghargaan **Juara I Pawai baris Berbaris** dan **Juara I Mobil Hias** Tingkat Instansi Pemerintah Pada Kegiatan Peringatan Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



Sumber : Humas, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2024

2. Penghargaan Terbaik Pertama atas kecepatan penginputan Sistem Pengendalian Inter Pemerintah (SPIP) Tahun 2024 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan pada tanggal 23 Desember 2024 di Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN



Dinas Pertanian Babel Terbaik Pertama Penginputan SPIP

PANGKALPINANG — Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendapat penghargaan terbaik pertama atas kecepatan penginputan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).



Penghargaan itu diserahkan Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Yunani Helmi kepada Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tri Wahyuni dan Admin SPIP Septian Surya Kencana, Senin 23 Desember 2024.

 distan.babelprov.go.id  Dinas Pertanian Babel  [distanpangan_babel](https://www.instagram.com/distanpangan_babel)  [Distan Channel](#)

Sumber : Humas, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2024

BAB IV

Penutup

BAB IV Berisi :

1. *Kesimpulan*
2. *Rekomendasi Peningkatan Kinerja*

4.1. Kesimpulan

Hasil laporan kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari analisis 4 (empat) sasaran, terdapat 3 (tiga) indikator kinerja utama yang dipilih sebagai tolak ukur. Pada tahun 2024, indikator kinerja Produktivitas pertanian tercapai dengan persentase 101.15 %, indikator kinerja Produksi Peternakan tercapai dengan persentase 102.11 %, dan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi tercapai dengan persentase 101.36 %.
2. Sasaran Meningkatnya tata kelola internal perangkat daerah (DPKP) dengan indikator nilai Reformasi Birokrasi (RB) perangkat daerah tidak dipilih sebagai tolak ukur karena menyesuaian dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023, yang menyatakan bahwa Penilaian RB tidak lagi dilakukan di Tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Maka demi keselarasan dokumen, dibuat SK Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.4/020/Kpts/DPKP-I Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang menerangkan bahwa indikator Nilai RB Perangkat Daerah (DPKP) **tidak lagi digunakan.**

3. Permasalahan yang dihadapi saat ini dalam rangka mencapai indikator kinerja utama adalah:
 - a. Alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi lahan non produktif, alih profesi petani, serta kondisi cuaca ekstrim yang mengakibatkan gagal panen beberapa komoditas pertanian;
 - b. Terjadinya kasus penyakit hewan menular pada hewan ternak, seperti wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan *Lumpy Skin Disease* (LSD) sehingga menyebabkan meningkatnya angka kematian, baik yang disebabkan oleh penyakit maupun potong paksa. Hal tersebut juga mempengaruhi jumlah pemasukan hewan ke Provinsi Bangka Belitung akibat pembatasan lalu lintas hewan;
 - c. Menurunnya produksi komoditas pertanian dan yang disebabkan kondisi cuaca ekstrim. Selain itu, tingginya kebutuhan pangan pokok tidak dapat diakomodir oleh pangan produksi lokal sehingga menyebabkan terjadinya inflasi pada beberapa komoditas pangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, khususnya pada hari raya keagamaan;
 - d. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pola konsumsi ideal yang dianjurkan sehingga mengakibatkan pola konsumsi masyarakat yang cenderung kurang beragam, baik dari jenis pangan maupun keseimbangan gizinya.
 - e. Belum optimalnya pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan untuk mengarahkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan.
4. Sedangkan untuk keberhasilan tercapainya kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak lepas dari ketersediaan data statistik komoditi pertanian dan peternakan untuk bahan penentuan sasaran, serta beberapa faktor kunci, antara lain:
 - a. Komitmen yang kuat seluruh pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mewujudkan

Sasaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

- b. Koordinasi internal yang berjalan dengan baik. Koordinasi internal Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilakukan secara berkala dan dikemas dalam acara *Coffee Morning* serta Apel Pagi sebelum memulai aktivitas kantor secara rutin.
- c. Koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan baik pusat maupun daerah sehingga program kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik.

4.2. Rekomendasi

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengawasan dan Monitoring Evaluasi (Monev) internal lingkup Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Memaksimalkan implementasi Perda/Pergub Kepulauan Bangka Belitung untuk mencapai sasaran kinerja perangkat daerah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Memaksimalkan peran stakeholder, swasta, dan institusi/lembaga, seperti Pihak Kepolisian, TNI, Lembaga Vertikal, dan Kementerian terkait untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan mewujudkan ketahanan pangan masyarakat Bangka Belitung;
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan informasi sektor pertanian dan ketahanan pangan yang aksesibel dan akuntabel;
5. Memaksimalkan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) pertanian serta pemanfaatan lahan non produktif menjadi lahan produktif melalui peran aktif Penyuluh Pertanian dan Instrumen Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
6. Memberikan penanaman nilai-nilai dasar (*Core values*) ASN “BerAKHLAK” sebagai acuan mendasar bagi Aparatus Sipil Negara khususnya di Dinas

Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melaksanakan tugas.

4.3. Rencana Aksi

Adapun rencana aksi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi sebagai berikut:

1. Memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada petani tentang teknik budidaya pertanian yang sesuai dengan *Good Agriculture Practice* (GAP), serta edukasi/pendekatan kepada petani agar lahan pertanian tidak dialih fungsikan menjadi lahan tambang;
2. Pelaksanaan Sekolah Lapang yang bisa memberikan pengetahuan kepada petani dalam menangani Organisme Pengganggu Tanaman (OPT);
3. Edukasi kepada petani dan peternak tentang manfaat dari program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dan Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K);
4. Meningkatkan kapasitas SDM (petani) melalui berbagai kegiatan pendampingan dan Latihan oleh penyuluh pertanian lapangan, serta meningkatkan kapabilitas ketenagaan dan kelembagaan penyuluh pertanian;
5. Menerapkan kebijakan terkait optimalisasi lahan sawah untuk meningkatkan produktivitas dengan melibatkan penyuluh pertanian provinsi untuk melakukan sosialisasi dan pendampingan ke petani;
6. Menggiatkan upaya-upaya dalam meningkatkan konsumsi pangan lokal khususnya kacang-kacangan, sayur dan buah melalui advokasi, kampanye, sosialisasi, dan promosi.
7. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Badan Pangan Nasional Republik Indonesia, dan Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait tindak lanjut dari keselarasan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) dan Pembangunan Pertanian serta Ketahanan Pangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perencanaan Strategis (Matriks Renstra)

**Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Capaian Tahun			
				2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatkan Produksi Pertanian	Peningkatan produktivitas pertanian	Produktivitas Pertanian (Ton/Ha)	6.61	6.94	7.29	7.65
		Peningkatan Produksi peternakan	Produksi Peternakan (Ton)	25.294,27	26.565,81 <i>(disesuaikan menjadi 29.303,89 karena target lebih rendah dibandingkan capaian tahun sebelum)</i>	27.901,28	29.303,89
2	Terwujudnya ketahanan pangan masyarakat melalui ketersediaan, distribusi, keterjangkauan, konsumsi pangan dan gizi serta keamanan pangan berbasis bahan baku, sumber daya dan kearifan lokal;	Meningkatnya konsumsi pangan yang beragam	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	86.48	87.77 <i>(disesuaikan menjadi 89.09, karena target lebih rendah dibandingkan capaian tahun sebelum)</i>	89.09	90.43
3	Mewujudkan reformasi birokrasi perangkat daerah (DPKP)	Meningkatnya tata kelola internal perangkat daerah (DPKP).	Nilai RB Perangkat Daerah (DPKP)	80.88 <i>(disesuaikan, indikator tidak lagi digunakan)</i>	81.29 <i>(disesuaikan, indikator tidak lagi digunakan)</i>	81.69 <i>(disesuaikan, indikator tidak lagi digunakan)</i>	82.10 <i>(disesuaikan, indikator tidak lagi digunakan)</i>

Sumber : Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2023-2026

Lampiran 2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR :188.4/020/Kpts/DPKP-I
TANGGAL : 20 Januari 2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	KONDISI AWAL 2022	TARGET				DEFINISI	FORMULA PERHITUNGAN (RUMUS MENGHITUNG REALISASI TARGET)	BIDANG PENANGGUNG JAWAB
				2023	2024	2025	2026			
1	Peningkatan produktivitas pertanian	Produktivitas Pertanian (Ton/ha)	6.79	6.61	6.94	7.29	7.65	Kemampuan atau daya dukung lahan pertanian dalam memproduksi tanaman/komoditas pertanian.	Total produksi komoditi pertanian dibagi luas tanam. (Ton/ha)	<ul style="list-style-type: none"> Bidang Perkebunan Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Bidang Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian UPTD Balai Benih Pertanian UPTD Balai Proteksi Tanaman UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Benih
2	Peningkatan produksi peternakan	Produksi Peternakan (Ton)	24,970.07	25,294.27	26,565.81	27,901.28	29,303.89	Jumlah Produksi ternak yang dihasilkan pada suatu wilayah dalam periode waktu tertentu.	Total penjumlahan produksi ternak dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. (Ton)	<ul style="list-style-type: none"> Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan UPTD Balai Benih Pertanian
3	Meningkatnya Konsumsi pangan yang beragam	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	81.10	86.48	87.77	89.09	90.43	Nilai yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama untuk memberikan gambaran tentang keragaman konsumsi pangan di masyarakat	Pengolahan data Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi dari a) Kelompok Pangan Umbi-umbian b)Kelompok Pangan Kacang-Kacangan c)Kelompok Pangan Buah dan Sayur.	<ul style="list-style-type: none"> Bidang Ketahanan Pangan UPTD Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan
4	Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah (DPKP)	Nilai RB Perangkat Daerah (DPKP)	87.49	80.88	81.29	81.69	82.10	Nilai yang digunakan sebagai tolak ukur pemerintah untuk mencapai <i>good governance</i> .	Angka yang diperoleh DPKP berdasarkan penilaian APIP dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB).	<ul style="list-style-type: none"> Sekretariat Seluruh UPTD Lingkup Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan

KEPALA DINAS
PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



EDI ROMDHONI, S.P., M.M.
Pembina Tk.I
NIP. 19701116 199303 1 005

Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Komplek Perkantoran & Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Jl. Pulau Pongok Kel. Air Itam Kec. Bukit Intan Pangkalpinang, 33418 Telp./Fax: (0717) – 439492
<https://www.distan.babelprov.go.id> ; Email : Distan@babelprov.go.id ; dokobabel@gmail.com

BERITA ACARA

Nomor : BA-001/DPKP/PK/2024

Pada hari ini Rabu, tanggal tiga puluh bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Awal Tahun Anggaran 2024 (terlampir).

Demikian Berita Acara penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Awal Tahun Anggaran 2024 dibuat dengan sesungguhnya dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Pangkalpinang
Pada tanggal 30 Januari 2024

Kepala Dinas,



Edi Romdhoni, S.P., M.M.
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19701116 199303 1 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : EDI ROMDHONI, S.P., M.M
Jabatan : Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. SAFRIZAL ZA, M.Si
Jabatan : Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalpinang, 30 Januari 2024

PIHAK KEDUA,
Pj. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



Dr. SAFRIZAL ZA, M.Si

PIHAK PERTAMA,
KEPALA DINAS PERTANIAN
DAN KETAHANAN PANGAN



EDI ROMDHONI, S.P., M.M
NIP. 197011161993031005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Formula Perhitungan Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Peningkatan produktivitas pertanian	Produktivitas pertanian (Ton/Ha)	6.94	Kemampuan atau daya dukung lahan pertanian dalam memproduksi tanaman/komoditi pertanian. Produktivitas pertanian dihitung berdasarkan total produksi komoditi pertanian dibagi luas tanam
2.	Peningkatan produksi peternakan	Produksi Peternakan (Ton)	26.565,81	Jumlah Produksi ternak yang dihasilkan pada suatu wilayah dalam periode waktu tertentu. Kurun waktu yang digunakan untuk perhitungan pencapaian target indikator kinerja adalah 1 (satu) tahun.
3.	Meningkatnya Konsumsi pangan yang beragam	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	87.77	Nilai yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama untuk memberikan gambaran tentang keragaman konsumsi pangan di masyarakat

Anggaran :

NO	Indikator Kinerja (Kolom 3)	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Produktivitas pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp 10.427.414.412,-	APBD
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp 3.609.360.000,-	APBD
		Program Penyuluhan Pertanian	Rp 3.618.991.600,-	APBD
		Program Perizinan Usaha Pertanian	Rp 521.973.700,-	APBD
		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp 560.968.954,-	APBD

Pernyataan ini telah ditandatangani secara elektronik dan diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (RSSE) ESSN

2.	Produksi Pernakan	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp 1.086.905.600,-	APBD
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp 2.563.936.280,-	APBD
3.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Rp 159.407.300,-	APBD
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp 191.714.900,-	APBD
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp 894.877.308,-	APBD
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp 182.294.500,-	APBD
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 35.805.928.255,-	APBD

Pangkalpinang, 30 Januari 2024

PIHAK KEDUA,
Pj. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



Dr. SAFRIZAL ZA, M.Si

PIHAK PERTAMA,
KEPALA DINAS PERTANIAN
DAN KETAHANAN PANGAN



EDI ROMDHONI, S.P., M.M
NIP. 197011161993031005

Lampiran 4. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 disertai dengan Berita Acara



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**

Komplek Perkantoran & Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Jl. Pulau Pongok Kel. Air Itam Kec. Bukit Intan Pangkalpinang, 33418 Telp./Fax: (0717) – 439492
<https://www.distan.babelprov.go.id> ; Email : Distan@babelprov.go.id ; dpknbabel@gmail.com

BERITA ACARA

Nomor : BA-002/DPKP/PK/2024

Pada hari ini Rabu, tanggal sebelas bulan November tahun dua ribu dua puluh empat, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun Anggaran 2024 (terlampir).

Demikian Berita Acara penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun Anggaran 2024 dibuat dengan sesungguhnya dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Pangkalpinang
Pada tanggal 11 November 2024

Kepala Dinas,



Edi Romdhoni, S.P., M.M.
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19701116 199303 1 005



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : EDI ROMDHONI, S.P., M.M
Jabatan : Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : SUGITO
Jabatan : Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalpinang, 11 November 2024

PIHAK KEDUA,
Pj. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



SUGITO

PIHAK PERTAMA,
KEPALA DINAS PERTANIAN
DAN KETAHANAN PANGAN



EDI ROMDHONI, S.P., M.M
PEMBINA UTAMA MUDA/IV.C
NIP. 197011161993031005

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Formula Perhitungan Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Peningkatan produktivitas pertanian	Produktivitas pertanian (Ton/Ha)	6.94	Kemampuan atau daya dukung lahan pertanian dalam memproduksi tanaman/komoditi pertanian. Produktivitas pertanian dihitung berdasarkan total produksi komoditi pertanian dibagi luas tanam
2.	Peningkatan produksi peternakan	Produksi Peternakan (Ton)	29.303,89	Jumlah Produksi ternak yang dihasilkan pada suatu wilayah dalam periode waktu tertentu. Kurun waktu yang digunakan untuk perhitungan pencapaian target indikator kinerja adalah 1 (satu) tahun.
3.	Meningkatnya Konsumsi pangan yang beragam	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	89,09	Nilai yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama untuk memberikan gambaran tentang keragaman konsumsi pangan di masyarakat

Target kinerja tidak diambil dari dokumen Renstra, melainkan penyesuaian dari capaian kinerja tahun sebelumnya.

Anggaran :

NO	Indikator Kinerja (Kolom 3)	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Produktivitas pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp 8.315.768.912,-	APBD-P
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp 1.934.960.800,-	APBD-P
		Program Penyuluhan Pertanian	Rp 2.296.980.800,-	APBD-P
		Program Perizinan Usaha Pertanian	Rp 521.973.700,-	APBD-P
		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp 391.168.954,-	APBD-P

2.	Produksi Peternakan	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp 708.946.700,-	APBD-P
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp 1.854.453.810,-	APBD-P
3.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Rp 0,-	APBD-P
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp 167.711.300,-	APBD-P
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp 240.469.604,-	APBD-P
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp 126.491.600,-	APBD-P
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 38.588.440.229,-	APBD-P

Pangkalpinang, 11 November 2024

PIHAK KEDUA,
Pj. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



SUGITO

PIHAK PERTAMA,
KEPALA DINAS PERTANIAN
DAN KETAHANAN PANGAN



EDY ROMDHONI, S.P., M.M
PEMBINA UTAMA MUDA/IV.C
NIP. 197011161993031005

Lampiran 5. Laporan Monev Rencana Aksi TW I s.d TW IV Tahun 2024

LAPORAN MONEV RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2024
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUNAN	TARGET TW I	REALISASI TW I	KETERANGAN
1	Peningkatan produktivitas pertanian	Produktivitas Pertanian (Ton/ha)	6,94	-	-	Perhitungan produktivitas pertanian tahun 2024 dihitung berdasarkan angka statistik yang diperoleh pada Bulan Desember 2024 (Triwulan IV)
2	Peningkatan produksi peternakan	Produksi Peternakan (Ton)	29.303,89	7.325,97	7.773,18	Data Produksi dari angka sementara komoditas ternak utama di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu Sapi potong lokal dan ayam
3	Meningkatnya Konsumsi pangan yang beragam	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	89,09	-	-	Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) dihitung berdasarkan sumbangan energi dari kelompok pangan utama selama satu tahun, perhitungan dilakukan pada Bulan Desember 2024 (Triwulan IV)

Kepala Dinas
Pertanian dan Ketahanan Pangan

Edi Romdhoni, S.P.,
Pembina Utama
NIP. 19701116 199303 1 005

MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI KINERJA
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2024	TRIWULAN II			PENJELASAN PROGRES TW II	PENANGGUNG JAWAB (BIDANG)
					TARGET TW II	REALISASI TW II	%		
1	Peningkatan produktivitas pertanian	Produktivitas Pertanian	Ton/ha	6,94	-	-	0	Perhitungan produktivitas pertanian tahun 2024 dihitung berdasarkan angka statistik yang diperoleh pada Bulan Desember 2024 (Triwulan IV) <i>*angka rilis tahunan</i>	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura; Bidang Perkebunan; Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian; Bidang Penyuluhan.
2	Peningkatan produksi peternakan	Produksi Peternakan	Ton	29.303,89	14.651,95	17.322,76	118,26	Data Produksi dari angka sementara komoditas ternak utama di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu Sapi potong lokal dan ayam	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	Meningkatnya Konsumsi pangan yang beragam	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor / Nilai	89,09	-	-	0	Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) dihitung berdasarkan sumbangan energi dari kelompok pangan utama selama satu tahun, perhitungan dilakukan pada Bulan Desember 2024 (Triwulan IV) <i>*angka rilis tahunan</i>	Bidang Ketahanan Pangan

Kepala Dinas
Pertanian dan Ketahanan Pangan

Edi Romdhoni, S.P., M.M.
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19701116 199303 1 005

MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI KINERJA
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2024	TRIWULAN II			PENJELASAN PROGRES TW III	PERSENTASE REALISASI ANGGARAN TW III	PENANGGUNG JAWAB (BIDANG)
					TARGET TW III	REALISASI TW III	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Peningkatan produktivitas pertanian	Produktivitas Pertanian	Ton/ha	6.94	-	-	0	Perhitungan produktivitas pertanian tahun 2024 dihitung berdasarkan angka statistik yang diperoleh pada Bulan Desember 2024 (Triwulan IV) <i>*angka rilis tahunan</i>	65.97%	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura; Bidang Perkebunan; Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian; Bidang Penyuluhan.
2	Peningkatan produksi peternakan	Produksi Peternakan	Ton	29.303,89	21.977,92	24.488,06	111,42%	Data Produksi dari angka sementara komoditas ternak utama di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu Sapi	82.70%	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	Meningkatnya Konsumsi pangan yang beragam	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor / Nilai	89,09	-	-	0	Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) dihitung berdasarkan sumbangan energi dari kelompok pangan utama selama satu tahun, perhitungan dilakukan pada Bulan Desember 2024 (Triwulan IV) <i>*angka rilis</i>	57.90%	Bidang Ketahanan Pangan

Kepala Dinas
Pertanian dan Ketahanan Pangan



Edi Romdhoni, S.P., M.M.
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19701116 199303 1 005

MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI KINERJA
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2024	TRIWULAN II			PENJELASAN PROGRES TW IV	PERSENTASE REALISASI ANGGARAN TW IV	PENANGGUNG JAWAB (BIDANG)
					TARGET TW IV	REALISASI TW IV	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Peningkatan produktivitas pertanian	Produktivitas Pertanian	Ton/ha	6.94	6.94	7.02	101,15 %	Perhitungan produktivitas pertanian tahun 2024 dihitung berdasarkan angka statistik yang diperoleh pada Bulan Desember 2024 (Triwulan IV) <i>*angka rilis tahunan</i>	88.35%	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura; Bidang Perkebunan; Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian; Bidang Penyuluhan.
2	Peningkatan produksi peternakan	Produksi Peternakan	Ton	29.303,89	29.303,89	29.923,40	102,11 %	Data Produksi dari angka sementara komoditas ternak utama di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu Sapi potong lokal dan ayam	91.55%	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	Meningkatnya Konsumsi pangan yang beragam	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor / Nilai	89,09	89,09	90,3	101,36 %	Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) dihitung berdasarkan sumbangan energi dari kelompok pangan utama selama satu tahun, perhitungan dilakukan pada Bulan Desember 2024 (Triwulan IV) <i>*angka rilis tahunan</i>	78.97%	Bidang Ketahanan Pangan

Kepala Dinas
Pertanian dan Ketahanan Pangan



Edi Romdhoni, S.P., M.M.
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19701116 199303 1 005

Lampiran 6. Dokumen LHE Akuntabilitas Tahun 2024



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
INSPEKTORAT DAERAH

KOMPLEK PERKANTORAN DAN PERMUKIMAN TERPADU PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
JL. PULAU BELITUNG KEL. AIR ITAM TELP. (0717) 439513 FAX 434693

Pangkalpinang, 04 April 2024

Nomor : 700/ 95 /LHE/ITDA/2024
Sifat : Rahasia
Lampiran : -
Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas AKIP
Tahun 2023 pada Dinas Pertanian
dan Ketahanan Pangan
Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung

Yth. Kepala Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung
di -
PANGKALPINANG

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kami telah melakukan evaluasi atas Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023, dengan tujuan:
 - a. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
 - b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
 - c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
 - d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
 - e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.
2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi:
 - a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja;
 - b. Penilaian pengukuran kinerja;
 - c. Penilaian pelaporan kinerja;
 - d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja.

3. Evaluasi AKIP harus dapat memberikan simpulan hasil penilaian beberapa variabel, antara lain kriteria-kriteria yang ada dalam penerapan komponen-komponen manajemen kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebagai fakta obyektif instansi pemerintah/unit kinerja yang mengimplementasikan SAKIP. Komponen-komponen tersebut kemudian dituangkan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE), sesuai dengan kriteria masing-masing komponen, variabel-variabel tersebut, yaitu:

a. Komponen

Terdiri dari Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

b. Sub-komponen

Dibagi dengan gradasi Keberadaan, Kualitas, dan Pemanfaatan pada setiap komponen.

c. Kriteria

Merupakan gambaran kondisi yang perlu dicapai di setiap sub komponen untuk dapat dinilai apakah kondisi tersebut sudah atau belum dicapai dan dapat digambarkan atau tidak.

No.	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
			2022	2023
1.	Perencanaan Kinerja	30	24,60	21,60
2.	Pengukuran Kinerja	30	24,00	23,70
3.	Pelaporan Kinerja	15	12,00	12,45
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	17,05	20,50
	Nilai Hasil Evaluasi	100	77,65	78,25
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB

4. Uraian hasil evaluasi atas masing-masing komponen manajemen kinerja sebagai berikut:

A. Perencanaan Kinerja

Kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan. Hasil evaluasi atas komponen "Perencanaan Kinerja" menunjukkan nilai sebesar **21,60** dengan uraian penilaian sebagai berikut:

1) Dokumen Perencanaan Kinerja Telah Tersedia

Hasil evaluasi atas sub komponen ini menunjukkan nilai sebesar **4,80**.

Penilaian dilakukan atas keberadaan dokumen perencanaan kinerja dengan kriteria antara lain:

- a) Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja.
- b) Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka panjang.
- c) Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah.
- d) Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek.
- e) Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja.
- f) Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja.

Kesimpulan bahwa dokumen perencanaan kinerja telah tersedia.

2) Dokumen Perencanaan telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting).

Hasil evaluasi atas sub komponen ini menunjukkan nilai sebesar **6,30**.

Penilaian dilakukan atas kualitas dokumen perencanaan kinerja dengan kriteria antara lain:

- a) Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan.
- b) Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan melalui ASR Menpan, belum melalui web dinas.
- c) Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai.
- d) Masih terdapat sasaran program yang belum outcome yaitu tersedianya dan berkembangnya sarana pertanian dan terdapat program berbeda tetapi memiliki sasaran kinerja yang sama.
- e) Masih terdapat indikator kinerja yang belum SMART, hanya berubah output yaitu tersedianya dokumen dan masih bersifat proses.
- f) Tidak terdapat target kinerja dalam renstra dan target program masih berupa output.
- g) Masih terdapat dokumen perencanaan kinerja yang belum selaras kondisi level jabatan.
- h) Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai disetiap level jabatan (Cascading).
- i) Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting).
- j) Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan kinerja.

Kesimpulan bahwa dokumen perencanaan kinerja belum sepenuhnya memenuhi standar yang baik dan kinerja yang SMART.

3) Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.

Hasil evaluasi atas sub komponen ini menunjukkan nilai sebesar **10,50**.

Penilaian dilakukan atas pemanfaatan dokumen perencanaan kinerja dengan kriteria antara lain:

- a) Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada kinerja yang ingin dicapai.
- b) Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung kinerja yang ingin dicapai.
- c) Data target kinerja belum tersedia.
- d) Rencana Aksi Kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala.
- e) Belum terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya.
- f) Belum terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik.
- g) Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah ditetapkan.
- h) Setiap pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.

Kesimpulan bahwa perencanaan Kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk mewujudkan kinerja yang berkesinambungan.

B. Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja, Hasil evaluasi atas komponen "Pengukuran Kinerja" menunjukkan nilai sebesar **23,70** dengan uraian sebagai berikut:

1) Pengukuran Kinerja Telah Dilakukan.

Hasil evaluasi atas sub komponen ini menunjukkan nilai sebesar **5,40**.

Penilaian dilakukan atas keberadaan pedoman pengukuran kinerja dengan kriteria antara lain:

- a) Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.
- b) Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja.

- c) Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.

Kesimpulan bahwa dokumen pengukuran kinerja telah tersedia.

2) Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara Efektif dan Efisien telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan.

Hasil evaluasi atas sub komponen ini menunjukkan nilai sebesar **6,30**.

Penilaian dilakukan atas kualitas pedoman pengukuran kinerja dengan kriteria antara lain:

- a) Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (*Decision Maker*) dalam mengukur capaian kinerja.
- b) Data Kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan.
- c) Belum menyajikan dokumen sehingga tidak dapat diperbaharui.
- d) Pengukuran Kinerja belum dilakukan secara berkala.
- e) Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang.
- f) Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi)
- g) Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).

Kesimpulan bahwa Pengukuran Kinerja belum sepenuhnya menjadi kebutuhan dalam kinerja secara Efektif dan Efisien secara berjenjang dan berkelanjutan.

3) Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian *Reward dan Punishment*, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.

Hasil evaluasi atas sub komponen ini menunjukkan nilai sebesar **12,00** dengan uraian sebagai berikut:

- a) Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.
- b) Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional.
- c) Pengukuran Kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (*reconfiguring*) organisasi.
- d) Pengukuran Kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja.
- e) Pengukuran Kinerja telah mempengaruhi penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja.

- f) Pengukuran Kinerja telah mempengaruhi penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja.
- g) Pengukuran Kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja.
- h) Belum efisiensinya penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.
- i) Setiap unit/satuan kerja belum sepenuhnya memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.
- j) Setiap pegawai belum sepenuhnya memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

Kesimpulan bahwa Pengukuran Kinerja belum sepenuhnya dijadikan dasar dalam pemberian *Reward* dan *Punishment*, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.

C. Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaan yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya. Hasil evaluasi atas komponen "Pelaporan Kinerja" menunjukkan nilai sebesar **12,45** dengan uraian sebagai berikut:

1) Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja.

Hasil evaluasi atas sub komponen ini menunjukkan nilai sebesar **2,40** dengan uraian sebagai berikut:

- a) Dokumen Laporan Kinerja telah disusun.
- b) Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala.
- c) Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan.
- d) Dokumen Laporan Kinerja belum direvisi.
- e) Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan
- f) Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu.

Dengan bahwa kesimpulan bahwa Dokumen Laporan Kinerja belum direvisi.

2) Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, Informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan penyempurnaannya.

Hasil evaluasi atas sub komponen ini menunjukkan nilai sebesar **4,05** dengan uraian sebagai berikut:

- a) Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar.
- b) Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja.

- c) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan terealisasi kinerja dengan target tahunan.
- d) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah.
- e) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- f) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja).
- g) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya.
- h) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.
- i) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).

Kesimpulan bahwa dokumen laporan kinerja telah tersedia namun belum direviu oleh Inspektorat.

3) Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.

Hasil evaluasi atas sub komponen ini menunjukkan nilai sebesar **6,00** dengan uraian sebagai berikut:

- a) Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab)
- b) Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai.
- c) Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.
- d) Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.
- e) Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja,
- f) Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.
- g) Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.
- h) Kepala Perangkat Daerah telah melakukan pemantauan terhadap isi dokumen LAKIP Perangkat Daerah, sehingga dokumen LAKIP diyakini telah menggambarkan kinerja.

Kesimpulan bahwa Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.

D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektivitas dan efisiensi kinerja. Hasil evaluasi atas komponen "Evaluasi Akuntabilitas" Kinerja Internal menunjukkan nilai sebesar **20,50** dengan uraian sebagai berikut:

1) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan.

Hasil evaluasi atas sub komponen ini menunjukkan nilai sebesar **4,50** dengan uraian sebagai berikut:

- a) Terdapat pedoman teknis Evaluasi AKIP Internal.
- b) Evaluasi AKIP Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.
- c) Evaluasi akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang.

Dengan bahwa kesimpulan bahwa Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan.

2) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai.

Hasil evaluasi atas sub komponen ini menunjukkan nilai sebesar **6,00** dengan uraian sebagai berikut:

- a) Evaluasi AKIP Internal telah dilaksanakan sesuai standar.
- b) Evaluasi AKIP Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai.
- c) Evaluasi AKIP Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai.
- d) Evaluasi AKIP Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.
- e) Evaluasi AKIP Internal belum dilaksanakan sepenuhnya menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).

Kesimpulan bahwa Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum menggunakan teknologi informasi (aplikasi).

3) Implementasi SAKIP telah meningkat karena Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektivitas dan efisiensi kinerja.

Hasil evaluasi atas sub komponen ini menunjukkan nilai sebesar **10,00** dengan uraian sebagai berikut:

- a) Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi AKIP Internal belum ditindaklanjuti.

- b) Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi AKIP Internal.
- c) Hasil evaluasi AKIP Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- d) Hasil evaluasi AKIP Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektivitas dan efisiensi.
- e) Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi AKIP Internal.
- f) Kepala Perangkat Daerah melakukan monitoring terhadap pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil evaluasi internal periode sebelumnya.

Kesimpulan bahwa Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi AKIP Internal belum ditindaklanjuti.

5. Rekomendasi

Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, kami merekomendasikan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, beserta seluruh jajarannya agar dilakukan perbaikan sebagai berikut:

- a. Mengupload Dokumen Perencanaan dan pengawasan dalam website Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- b. Memperbaiki rumusan sasaran – program dalam cascading dan renstra.
- c. Memperbaiki indikator kinerja yang belum SMART.
- d. Menyajikan dan kinerja yang mendukung capaian kinerja.
- e. Menindaklanjuti rekomendasi tahun sebelumnya dan tahun ini.
- f. Untuk melakukan Reviu Laporan Kinerja Tahun 2023.
- g. Untuk membuat Aplikasi Evaluasi AKIP.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kami menghargai upaya Kepala Dinas beserta seluruh jajaran dalam menerapkan manajemen kinerja dilingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Saudara.

INSPEKTUR
 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, *ly*
 Selaku Koordinator Pengawas

 SUSANTO
 Pembina Utama Madya
 NIP. 1963061211985031001

Lampiran 7. Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP PD Tahun 2024

No.	Saran/Rekomendasi	Tindak Lanjut
1.	<p>Surat Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 700/95/LHE/ITDA/2024 Hal Laporan Hasil Evaluasi atas AKIP pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tanggal 04 April 2024.</p> <p>Rekomendasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengupload Dokumen Perencanaan dan Pengawasan dalam website Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; 2. Memperbaiki Rumusan Sasaran-Program dalam cascading dan Renstra; 3. Memperbaiki Indikator Kinerja Yang Belum SMART; 4. Menyajikan data kinerja yang mendukung capaian kinerja; 5. Menindaklanjuti Rekomendasi Tahun Sebelumnya dan Tahun ini; 6. Untuk melakukan Reviu Laporan Kinerja Tahun 2023; 7. Untuk Membuat Aplikasi Evaluasi AKIP. 	<p>Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pencapaian target kinerja (output dan outcome) Tahun 2024 dengan langkah-langkah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun Dokumen Cascading Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023-2026; 2. Merumuskan kembali Sasaran Program/Kegiatan dalam Cascading dan Renstra dengan menyusun dokumen Renstra Perubahan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026; 3. Melaksanakan Rapat Pimpinan Lingkup Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka untuk mengevaluasi Indikator Kinerja yang belum memenuhi kriteria SMART, dan memperbaiki indikator Program/Kegiatan tersebut dalam Dokumen Renstra Perubahan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026; 4. Melaksanakan Rapat Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi berkala per Triwulan yang melibatkan Pejabat eselon dan PPK/PPTK di lingkup Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan; 5. Rekomendasi dari Tim Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Terhadap Hasil Evaluasi atas AKIP Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023 telah ditindaklanjuti. Rekomendasi AKIP dari Tim Inspektorat di tahun 2024 akan dibuatkan Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) dan dimonitoring secara berkala; 6. Melaksanakan Rapat Pimpinan Lingkup Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka untuk melakukan Reviu Terhadap Laporan Kinerja Tahun 2023, serta melakukan reviu/evaluasi mandiri oleh Tim AKIP Internal Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; 7. Aplikasi Evaluasi AKIP untuk OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah dilakukan melalui aplikasi Sistem Pengendalian Evaluasi Perencanaan dan Sakip Terintegrasi (SIPENA SAKTI) dan aplikasi eSakip Babel yang dikoordinir oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk dilakukan penginputan setiap 3 bulan (triwulanan) oleh seluruh OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Mengetahui,
Kepala Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan



EDI ROMDHONI, S.P., M.M
NIP. 197011161993031005

Lampiran 8. Scan Piagam Penghargaan Kepala Perangkat Daerah Tahun 2024





**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**